

**Pergolakan Ideologi**  
*Gerakan Perempuan di Indonesia*  
**Dalam Transformasi Sosial**

**Jaleswari Pramodawardhani**

**Pergolakan Ideologi Gerakan Perempuan di Indonesia Dalam Transformasi Sosial/Jaleswari Pramodawardhani, Anas Saidi, Irwan Abdullah. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI, 2004.**  
ii, 96 hlm, 21 cm

**ISBN: 979-3584-23-8**

1. Ideologi – Perempuan – Indonesia

140. 3054.

## **PERGOLAKAN IDEOLOGI GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM TRANSFORMASI SOSIAL**

Cover : Gambar dari cover buku Ontologi Membedah Pemikiran Tokoh Perempuan di Garis Depan, penerbit PB Korp. PMII Putri

Penerbit : Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI  
Widya Graha, Lantai VI & IX  
Jalan Gatot Subroto 10, Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5701232  
Fax : (021) 5701232

PMB - LIPI

# Pergolakan Ideologi

## *Gerakan Perempuan di Indonesia*

### Dalam Transformasi Sosial

Oleh :  
Jaleswari Pramodawardhani  
Anas Saidi  
Irwan Abdullah



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan  
(PMB-LIPI)  
Jakarta, 2004



# KATA PENGANTAR

Penelitian “Pergolakan Ideologi Gerakan Perempuan di Indonesia Dalam Transformasi Sosial”, merupakan salah satu kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun anggaran 2004.

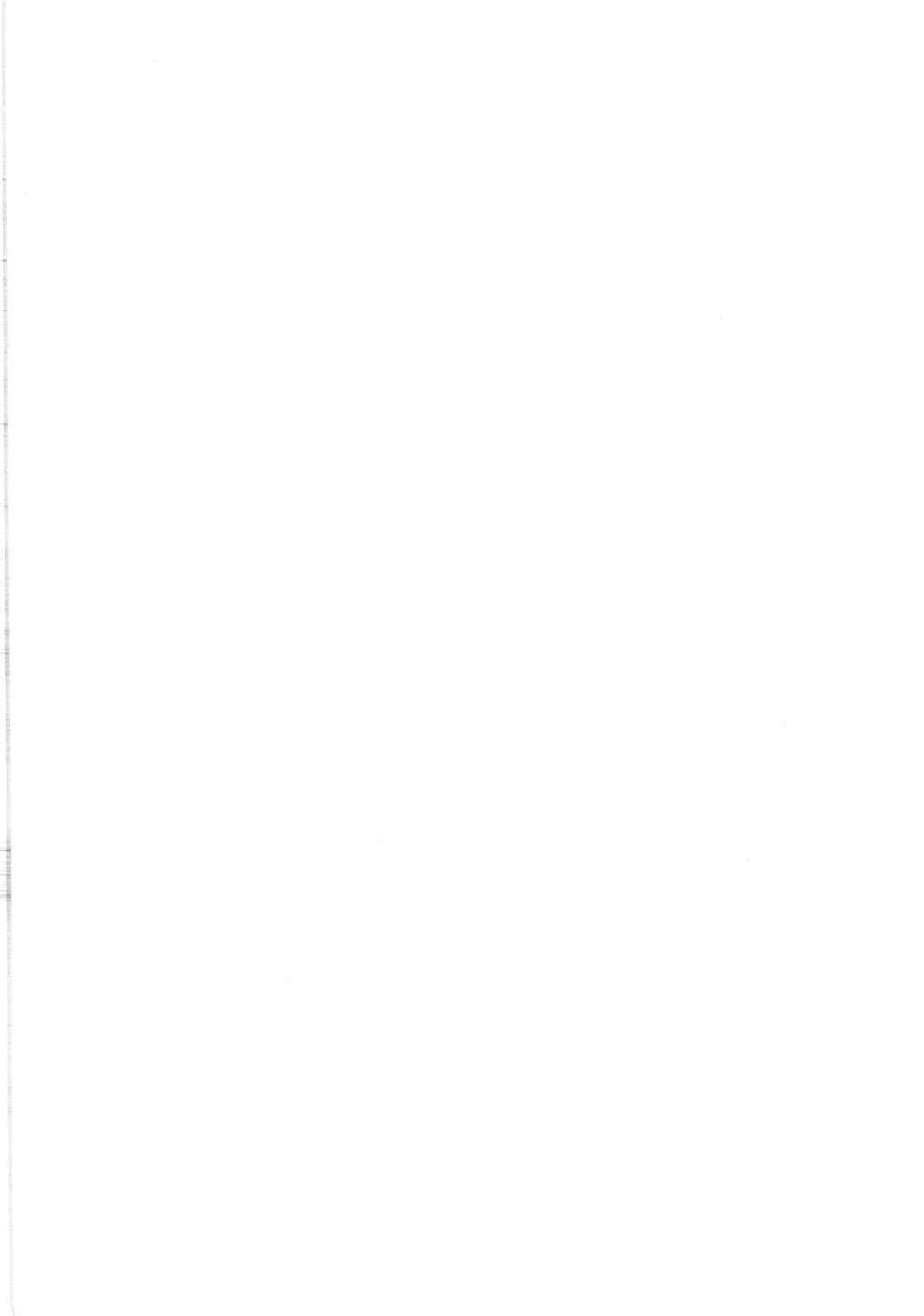
Kegiatan penelitian ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar berkat adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak dan kalangan, baik dari pemerintah pusat ataupun daerah, berbagai instansi atau lembaga pemerintah dan swasta serta masyarakat terutama di daerah penelitian. Atas segala kerjasama dan bantuan yang menjadikan lancarnya penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tidak lupa pula disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jerih payah dan kerja keras para peneliti dan staf administrasi di lingkungan PMB-LIPI pada khususnya yang terlibat di dalam proses terselenggaranya kegiatan penelitian ini.

Laporan hasil penelitian ini telah dibahas secara mendalam pada seminar hasil-hasil penelitian PMB-LIPI, yang diselenggarakan pada bulan September 2004. Meskipun demikian, dengan rasa rendah hati kami sangat mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran atas segala kekurangan dan keterbatasan serta kelemahan dalam penyusunan laporan ini. Tentulah kiranya catatan dan saran yang diharapkan berguna untuk penyempurnaan laporan penelitian di lingkungan PMB-LIPI di masa yang akan datang.

Jakarta, 31 Desember 2004  
Kepala Pusat Penelitian  
Kemasyarakatan dan Kebudayaan –  
LIPI

Ttd.

**Dr. M. Hisyam, APU**



## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PERGOLAKAN IDEOLOGI GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM TRANSFORMASI SOSIAL ....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB III PROFIL 2 ORNOP PEREMPUAN DI INDONESIA .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>



# **BAB I**

## **PERGOLAKAN IDEOLOGI GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM TRANSFORMASI SOSIAL**

### **Latar Belakang Masalah**

**S**alah satu agenda yang agaknya terabaikan dalam gerakan perempuan di Indonesia adalah tiadanya kritik ideologis atas dirinya sendiri. Selama ini gerakan yang dilakukan lebih mengesankan sebagai gerakan “ikutan” atas maraknya gerakan LSM pada dekade 70-an, daripada sebagai gerakan independen yang memiliki landasan paradigmatis sebagai gerakan untuk penciptaan dunia yang lebih adil yang berkeadilan gender. (Hafidz, 1993;96). Sehingga meskipun terjadi perkembangan yang pesat jika ditinjau dari jumlah, keragaman dan letak geografisnya namun peranan mereka dalam transformasi sosial masih perlu dipertanyakan (Fakih, 2000;2).

Gejala ketidakjelasan dan disorientasi dalam visi, posisi, dan misi LSM Indonesia sebagai organisasi gerakan sosial menuju demokratisasi dan transformasi di negeri ini sesungguhnya telah diungkap oleh banyak peneliti. Salah satunya adalah Mansour Fakih (2000;7) dalam penelitiannya menunjukkan adanya kontradiksi antara jargon dan teori kebanyakan LSM besar dengan kenyataan kegiatan mereka di lapangan.

Masalah ketidakjelasan landasan paradigma dan teoritis ini juga menyumbangkan terjadinya kecenderungan penjinakan dan pelunakan maupun kooptasi terhadap pelbagai metodologi dan teknik yang radikal dan kritis.

Lalu bagaimana dengan Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) perempuan? Apakah mereka juga menyandang stigma serupa? Atau ada “cap” lain disamping harus menyandang stigma umum sebagai ORNOP (LSM)?

Barangkali setiap kita berbicara tentang gerakan perempuan, sejarah pergerakanlah yang ada dalam pikiran sehingga sejarah perempuan sering disamakan dengan sejarah pergerakan perempuan (Kuntowidjono; 1994:104-105). Memang tidak bisa dipungkiri sejak awal sejarahnya gerakan perempuan Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh dan mengambil model gerakan yang sama dengan Barat. Misalnya ide-ide emansipatif Kartini atau strategi perjuangan organisasi-organisasi perempuan untuk menggolkan Undang-Undang Perkawinan pada dekade 1950-an yang mengambil model perjuangan feminis liberal yaitu reformasi hukum sampai pada isu-isu gender yang dipilih oleh organisasi-organisasi perempuan kontemporer seperti masalah peran ganda, perkosaan, aborsi, kekerasan domestik, dan isu-isu gender lainnya (Hafidz, 1993;96, Tong:1993).

Dari segi periodisasi, pada masa Orde Baru inilah justru gerakan perempuan telah berkembang dengan pesat, baik dari segi jumlah, keragaman, serta letak geografinya, namun cenderung dianggap kehilangan peran dan signifikansinya dalam pergulatan menentukan arah transformasi yang sedang berlangsung dalam masyarakatnya. Hal ini disebabkan kondisi politik masa Orde Baru cenderung menghilangkan daya kritis dan inovatif mereka dan seringkali dianggap fase yang paling suram terhadap gerakan ini.

Dengan demikian, meskipun terjadi peningkatan dalam jumlah, namun peranan mereka dalam transformasi sosial secara global masih perlu dipertanyakan (Fakih : 1996).

Mengapa ini menjadi penting? Pertama, gerakan perempuan yang diwakili oleh organisasi-organisasi perempuan dan kelompok-kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan sering dipertanyakan signifikansi eksistensinya (Hafidz, 1993:93-94). Mereka yang fanatik dengan perjuangan kelas menuduh gerakan perempuan mengada-ada karena isu-isu yang diperjuangkannya akan dengan sendirinya selesai jika perjuangan kelas berhasil. Sementara kalangan Nasionalis menuding gerakan perempuan kebarat-baratan dan mengurus isu yang dilakukan oleh perempuan kelas menengah yang dipertanyakan kepentingan politiknya. Sedangkan mereka yang mengedepankan masalah bangsa lebih dari yang lain memandang isu-isu yang dipermasalahkan gerakan perempuan cenderung parsial dan karenanya tidak menyumbang secara substansial pada pemecahan permasalahan bangsa.

Kedua, dari segi periodisasi, ada beberapa tahapan yang dianggap ikut mewarnai gerakan perempuan di Indonesia, namun tidak pernah dipertanyakan lebih mendalam atau kritik terhadapnya, benarkah periodisasi ini menyumbangkan kesadaran terhadap pergerakan perempuan di Indonesia atau justru sebaliknya menciptakan mitos-mitos didalamnya?

## **Jaman Kolonial**

Yang ditandai dengan perjuangan memanggul senjata untuk mengusir penjajah dari muka bumi Indonesia, dengan tokoh-tokohnya Cut Nyak Dien, Cut Meutia, dan lain-lain (Ridjal, 1993; Wieringa, 1999). Sosok Cut Nyak Dien pada fase ini, selalu dianggap sebagai tipe ideal dari perjuangan kaum perempuan dalam peperangan. Bahwa Cut Nyak Dien bisa juga dianggap sebagai simbolisasi "keperkasaaan" laki-laki, dalam dunia maskulin Aceh-Islam, tidak pernah dipertanyakan.

## **Era Kartini**

Surat-surat Kartini banyak berbicara tentang nilai tradisi yang membelenggu perempuan, menjadikannya tergantung kepada laki-laki, memperlakukannya sewenang-wenang dan tidak berdaya. Kondisi yang tidak jauh berbeda dengan di Barat pada masa itu. Namun berbeda di Barat yang menunjuk laki-laki sebagai sumber permasalahan. Kartini secara tepat menempatkan permasalahan penindasan perempuan sebagai bagian dari permasalahan sistem budaya masyarakatnya. Maka berdasarkan pemahaman yang cerdas, atas permasalahan konteksnya. Kartini mengambil pendidikan sebagai titik strategis yang harus didobrak dan dibuka untuk kaum perempuan. Satu pendekatan yang tepat, karena pendidikan merupakan salah satu faktor yang dengan nyata mengubah sistem nilai dalam masyarakat. Selain menawarkan berbagai kesempatan bagi perempuan untuk mengemansipasikan dan mengaktualisasikan diri (Hafidz, 1993;94-95).

## **Tahun 1928**

Tahun 1928 dianggap sebagai titik balik penting perjuangan gerakan perempuan dengan diadakannya Kongres Perempuan di Yogyakarta. Soekarno, yang kemudian menjadi Presiden pertama di Indonesia, yang ketika itu telah aktif sebagai pejuang gerakan nasionalisme memberikan sambutannya. Ia meyakinkan kaum perempuan bahwa masalah krusial bangsa saat itu adalah perjuangan memerdekakan diri dari penindasan kolonialis Belanda. Hak dan emansipasi perempuan akan dengan serta merta terwujud di alam merdeka. Sejak itu gerakan perempuan menggabungkan diri dengan gerakan kemerdekaan dan isu gender sementara dikesampingkan. Dengan partisipasinya dalam perjuangan

kemerdekaan bangsa, gerakan perempuan memang telah memberikan sumbangan yang besar dan penting (Hafidz, 1993;95).

### **Masa Orde Lama**

Yang dianggap lebih memberi peluang terhadap aktualisasi gerakan ini. Sehingga Gerwani, misalnya, seringkali dianggap merupakan tipikal keberhasilan sekaligus akar stigmanisasi terhadap perlunya pembatasan gerakan yang bernuansa gender pada periode berikutnya.

### **Pada masa Orde Baru**

Inilah justru gerakan perempuan telah berkembang dengan pesat, baik dari segi jenis organisasi maupun jumlahnya, namun cenderung dianggap kehilangan peran dan signifikasinya dalam pergulatan menentukan arah transformasi yang sedang berlangsung dalam masyarakatnya. Hal ini disebabkan kondisi politik masa Orde Baru cenderung menghilangkan daya kritis dan inovatif mereka dan seringkali dianggap fase yang paling suram terhadap gerakan ini (Fakih, 1996 : Marcoes, 1997).

### **Masa Transisi**

Periode ini secara ideologis, bisa disebut sebagai luasnya peluang untuk melakukan "pencerahan" terhadap gerakan perempuan. Masalahnya adalah apakah atmosfer politik yang relatif

kondusif terhadap hadirnya gerakan perempuan ini telah meletakkan dasar-dasar pembebasan yang lebih strategis dan long-term sifatnya.

Ketujuh tahapan ini menggambarkan betapa gerakan perempuan di Indonesia mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Selama ini, kesan yang tertangkap, gerakan-gerakan yang dilakukan masih bersifat “jangka pendek”, “problem solving oriented”, untuk tidak mengatakan parsial. Wilayah-wilayah strategis yang menjadi kendala utama, rasanya belum tersentuh secara mendasar. Misalnya, betapapun, selama ini, telah berhasil teridentifikasi seluruh halangan struktural, mulai dari persoalan hukum yang mendiskriminasi hak-hak perempuan, atau ketidak berimbangan kuota keterlibatan perempuan hampir dalam semua lini serta daftar pelanggaran HAM yang sangat mensubordinasi perempuan, tetapi perumusan agenda yang paling strategis yang menentukan gerakan perempuan jangka panjang belum terumuskan dengan baik.

Tiada agenda yang lebih holistik terhadap titik strategis inilah, yang nampaknya ikut membuat gerakan perempuan di Indonesia, terjebak pada penuntutan kuota, penyelesaian jangka pendek dan seterusnya, sehingga arena gerakan perempuan malah bisa terjebak dalam tuntutan yang “a-historis” atau berorientasi pada advokasi jangka pendek. Tanpa mengurangi arti pentingnya seluruh gerakan yang selama ini telah dilakukan, tema-tema strategis yang ikut menjadi kendala ideologis seperti masalah: agama dan kebudayaan, pendidikan, serta perubahan-perubahan lain yang memiliki jangka panjang terasa belum tergarap.

Untuk mengetahui seberapa jauh: gerakan perempuan memiliki konsistensi terhadap persoalan strategis jangka panjang tersebut, maka studi verifikasi terhadap ORNOP perempuan, menjadi penting untuk dilakukan. Harapannya bukan hanya akan teridentifikasi seluruh kendala yang ada, tetapi juga akan dapat

dirumuskan point-point strategis yang lebih memungkinkan gerakan perempuan di Indonesia lebih bersifat *massive*.

## Rumusan Masalah

Sejalan dengan pemikiran diatas, permasalahan yang ingin dikaji melalui penelitian ini adalah: Bagaimana peran ORNOP perempuan dalam transformasi sosial di Indonesia? Dan sejauh mana gerakan-gerakan itu menyentuh masalah-masalah strategis, yang diduga akan memainkan peran penting atas keberhasilan gerakan itu dalam jangka panjang?

Persoalan ini akan dijawab dengan memusatkan penelitian pada tiga pertanyaan penelitian:

- (1) Bagaimana Kerangka Konseptual (ideologi, paradigma) yang dipakai oleh ORNOP perempuan dalam transformasi sosial? Apakah masing-masing ORNOP perempuan memiliki landasan ideologi sebagai pedoman?
- (2) Maksud dan tujuan untuk mempertanyakan hal tersebut adalah terutama sekali, untuk memahami peta pemikiran, paradigma, dan landasan ideologis para aktivis ORNOP perempuan.
- (3) Seberapa jauh terjadi konsistensi antara kerangka konseptual (ideologi, paradigma) dan metode kerja dalam praktiknya.

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk memahami cara kerja ORNOP perempuan dengan melihat konsistensi kerangka konseptual dan praktik kerjanya.

- (1) Apakah gerakan perempuan yang ada selama ini, telah menyentuh masalah-masalah strategis, yang diduga akan memainkan peran penting atas keberhasilan gerakan itu dalam jangka panjang.
- (2) Pertanyaan ini dimaksudkan untuk melihat efektivitas gerakan perempuan di Indonesia dengan melihat ideologi, teori, dan praktiknya jangka pendek maupun jangka panjang.

### **Kerangka Pemikiran**

Di Indonesia kata “pembangunan” menjadi diskursus yang dominan dan erat kaitannya dengan lahirnya Orde Baru. Kata pembangunan selain menjadi semboyan juga diabadikan sebagai nama kabinet Pemerintahan Orde Baru. Esensi dari kata pembangunan dalam konteks Orde Baru adalah terkait erat dengan diskursus pembangunan (*discourse of development*) yang dikembangkan oleh negara-negara barat.

*Women in Development* (WID) menjadi salah satu diskursus pembangunan dan merupakan pendekatan dominan bagi pemecahan persoalan perempuan dunia ketiga. Gagasan WID dianggap satu-satunya jalan guna memperbaiki status dan nasib berjuta-juta perempuan di dunia ketiga. WID dimulai pada tahun 70-an, konsep ini dimulai ketika pemerintah AS mengumumkan *The Percy Amendment* (tentang Undang-Undang bantuan Luar negeri) yang secara jelas mencantumkan perempuan dalam program *International Development*. Program WID pada USAID juga dibuat pada tahun yang sama. Kebijakan ini mempengaruhi PBB sehingga pada waktu itu dinyatakan sebagai *International Decade of Women* (1976-1985) (Miguire; 1984).

Sebagian besar literatur mereka sangat praktis, memusatkan perhatian kepada isu-isu yang langsung berkenaan dengan bagaimana mendorong partisipasi perempuan dalam program pembangunan. Sebagian yang lainnya merupakan orientasi kebijakan, yang melakukan analisis atas program pembangunan masa lalu yang cenderung memiskinkan perempuan, sampai mencari program apa, struktur kelembagaan yang bagaimana, dan berapa banyak sumber daya yang harus disediakan untuk tujuan itu.

Agenda utama WID adalah bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan. Asumsinya penyebab keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan.

Ini adalah dasar analisis teori feminisme liberal yang beranggapan bahwa subordinasi perempuan terjadi karena adanya suatu set budaya dan hukum yang membatasi akses dan sukses perempuan di dalam sektor publik karena adanya keyakinan yang salah bahwa perempuan tidak sekuat dan secerdas laki-laki. Feminisme liberal percaya bahwa untuk menyejajarkan perempuan dengan laki-laki, semua hambatan dan sistem yang membatasi aktualisasi diri perempuan harus dihapuskan. Tetapi kemudian feminisme liberal beranggapan jika semua sistem sudah mendukung dan semua hambatan sudah dihapuskan, atau jika perempuan, dan laki-laki sudah berada dalam sistem yang memperlakukan perempuan dan laki-laki sama, dan perempuan tetap tidak bisa menyejajarkan diri dengan laki-laki, maka itu merupakan kesalahan perempuan itu sendiri. (Tong, 1998:2).

Menurut Tong selanjutnya, feminisme liberal kontemporer lebih berfokus kepada "welfare liberalism". Tidaklah heran analisis feminisme liberal kemudian menjadi pemikiran yang mendasari program *Women in Development*, maraknya Pusat Studi Wanita di

banyak perguruan tinggi, LSM perempuan dan program-program untuk memicu pemberdayaan perempuan.

Fakih (1996), juga menyebutkan pendekatan ini menghasilkan:

- Analisis pengentasan kemiskinan (*antipoverty*)

Intinya adalah bahwa perempuan menjadi miskin, karena aksesnya yang kecil akan sumber daya dan karena perempuan tidak “produktif” atau menghasilkan secara ekonomi.

- Analisis pendekatan efisiensi

Pemikirannya adalah bahwa pembangunan gagal karena perempuan tidak dilibatkan.

Kritik pertama muncul tahun 1970-an oleh Ester Boserup (1970) merupakan kritik feminis pertama atas pandangan asumsi konvensional kaum liberal tersebut, terutama atas pandangan mereka bahwa teknologi membebaskan perempuan. Bagi Boserup, peningkatan teknologi pertanian justru telah merendahkan status perempuan, karena menyingkirkan akses perempuan terhadap kerja produktif.

WID yang merupakan strategi arus utama *developmentalism*, lebih menghasilkan penjinakkan dan pengekangan perempuan dunia ketiga, ketimbang membebaskannya. Banyak kajian yang dilakukan atas masalah ini. Ada yang mengkritik dari segi ekonomi, dan teknologi (Stamp, 1989; Boserup; 1970) dari aspek isu diskursus dan pengetahuan/kekuasaan (Mueller A., 1987), maupun dari aspek lingkungan (Shiva, 1989), serta aspek-aspek lainnya.

“Era pembangunan” pada masa Orde Baru mendorong pula munculnya LSM-LSM di Indonesia. Di awal tahun 70-an organisasi yang berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat ini bermunculan sebagai respons atas masuknya arus dana dan bantuan dari lembaga-lembaga donor asing (Natzir, 1997:75 : Fakih, 2000:6).

Faktor internal lain adalah adanya kesadaran di kalangan sebagai elite terdidik untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pembangunan.

Untuk memahami dominasi perempuan terhadap dunia ketiga (dalam hal ini termasuk Indonesia) dan gerakan perempuan di Indonesia penelitian ini ingin memusatkan analisis kepada konsep WID. Konsep WID diperlakukan sebagai payung besar dalam menganalisis pergolakan ideologi perempuan di Indonesia dalam transformasi Sosial. Alasan mendudukan WID sebagai sasaran analisis didasarkan asumsi bahwa seseorang tidak dapat memahami isu-isu perempuan dunia ketiga tanpa mempertimbangkan agenda WID. Sehingga akan terlihat bagaimana gerakan perempuan di Indonesia yang dilakukan oleh ORNOP-ORNOP perempuan ini menyikapi, menghadapi, dan melaksanakan agenda WID yang terimplementasikan dalam paradigma, metodologi, maupun praktik kegiatannya.

Untuk itulah perlunya penggunaan perspektif dialektis dalam melihat isu-isu perempuan dalam Pembangunan dengan menggunakan analisis politik, ekonomi, social, dan alam untuk melihat pembangunan. Dengan kata lain penelitian ini memandang gerakan perempuan dalam konteks pembangunan dengan menggunakan perspektif pembangunan dari beberapa lensa. (Fakih, 2000:95) Misalnya analisis feminisme liberal, analisis feminisme marxis, analisis feminisme radikal, maupun analisis feminisme lainnya. Analisis ini tidak mewujudkan secara independen tetapi saling berkait.

Sebenarnya ada dua model pendekatan ORNOP selama ini. Pertama pendekatan yang lebih bertumpu pada perbaikan kondisi perempuan. Kedua, pendekatan yang menghendaki adanya perubahan dan perbaikan posisi perempuan melalui perubahan bentuk relasi laki-laki dan perempuan di berbagai tingkatan, mulai tingkat rumah tangga, masyarakat sampai negara. (Natzir, 1997; 82-83).

Jika yang pertama lebih berorientasi pada program-program yang dapat membantu perempuan dalam peran dan tugas-tugas tradisionalnya sebagai isteri atau ibu, yang kedua justru menggugat dan mengkritisi peran tersebut.

Contoh program pendekatan model pertama adalah perbaikan kondisi ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan sebagainya. Dalam aktivitasnya tidak mempertanyakan mengapa kondisi ekonomi lingkungan, pendidikan perempuan lebih buruk dari laki-laki. Juga tidak mempersoalkan tatanan masyarakat yang memperlakukan perempuan secara diskriminatif, jenis pekerjaan yang pantas dan tidak pantas dilakukan perempuan, upah dan tunjangan, sistem warisan, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan lebih pada pembinaan-pembinaan ketrampilan praktis yang tidak dibarengi dengan pembentukan kesadaran tentang tatanan masyarakat yang tidak netral terhadap laki-laki dan perempuan.

Pendekatan kedua lebih berupa untuk menyadarkan kaum perempuan dan laki-laki atas peran gender mereka yang ternyata seringkali berdampak lebih buruk pada salah satu pihak. Contohnya mereka berusaha mengubah anggapan perempuan tidak bisa mengubah akses ekonomi karena kurang trampil tidak gesit atau kurang pendidikan, tapi karena ada asumsi klasik bahwa perempuan dianggap bukan pencari nafkah melainkan sekadar mencari nafkah tambahan. Asumsi sederhana ini berakar dari cara pandang yang sangat dalam tentang peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki

dianggap pemimpin, perempuan dipimpin, laki-laki pencari nafkah, perempuan pengelola rumah tangga, laki-laki superior, perempuan inferior, dan seterusnya.

Artinya pendekatan model kedua, yang digugat bukan perempuannya melainkan struktur dan sistemnya yang memang memperlakukan perempuan secara tidak adil. Hal ini terdapat dalam seluruh tatanan nilai, mulai budaya, ekonomi, sosial, agama, maupun politik. Oleh karena itu, jenis dan bentuk kegiatan yang dilakukan berbasis pada kesadaran tentang peran gender yang timpang. Kedua model pendekatan ini pada dasarnya berperan sangat penting dan saling bahu membahu dalam mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan.

## **Metodologi Feminis**

Dalam penelitian ini akan diupayakan penggunaan penelitian feminis yang dianggap lebih relevan daripada observasi sederhana mengenai perempuan. Penelitian ini juga memasukkan metodologi feminis.

Sandra Harding membedakan antara metodologi, metode dan epistemologi. Menurutnya metodologi ialah suatu teori dan analisis mengenai bagaimana riset dilakukan atau dimulai, sedangkan metode ialah teknik (atau cara bekerja mengumpulkan fakta-fakta. (Harding, 1987 : 2-3).

Epistemologi menunjukkan pada ..... Teori Pengetahuan. Epistemologi menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang bisa menjadi yang mengetahui (bisakah perempuan); tes-tes keyakinan apakah yang harus dilewati agar disahkan sebagai pengetahuan (apakah hanya tes terhadap pengalaman-pengalaman

dan observasi laki-laki?); hal-hal macam apakah yang harus dikenali? (bisakah kebenaran subyektif dianggap sebagai pengetahuan?) dan seterusnya (Harding, 1987: 3).

Epistemologi memainkan peranan signifikan dalam membentuk metodologi feminis serta memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai metode tradisional. Sandra Harding menggambarkan tiga ciri metodologi feminis atau pilihan feminis terhadap metode :

*Pertama*, metodologi itu memanfaatkan sumber-sumber empiris dan teoritis baru yang menggabungkan rangkaian penuh pengalaman-pengalaman perempuan, termasuk pengalaman perempuan dari berbagai ras, kebudayaan, kelas, dan sebagainya.

*Kedua*, masalah penelitian dipandang sebagai tak terpisahkan dari tujuan penelitian dan analisis; peneliti tidak bisa melepaskan diri dari tujuan serta konsekuensi-konsekuensi penelitian mereka.

*Ketiga*, peneliti dilihat dalam lingkungan yang sama sebagaimana subyek penelitian yakni, kelas, ras, kebudayaan, serta asumsi-asumsi jenis kelamin, kepercayaan dan perilaku peneliti sendiri harus ditempatkan di dalam kerangka lukisan yang hendak digambarkan (Harding, 1987:9). Fakta-fakta empiris itu sendiri meliputi kepercayaan, sikap dan juga perilaku peneliti.

Metodologi feminis bukanlah suatu kesatuan yang terpisah dari metodologi-metodologi lain, tapi lebih merupakan penerapan prinsip-prinsip feminis pada kegiatan ilmiah. Tidak ada suatu pendekatan metodologi tunggal yang dapat kita definisikan sebagai feminis. Boleh jadi benar-benar ditemukan suatu eksperimen kuantitatif feminis (Wallston, 1985:226-233) bersama-sama penelitian kualitatif berdasarkan jenis kelamin (*Nebraska Sociological Feminist Collective*, 1983-543).

## Definisi Operasional

Dalam tulisan ini dipergunakan beberapa terminologi yang ingin coba dijelaskan penggunaannya dalam penelitian

- **Pergolakan Ideologi**

Yang dimaksud disini adalah dengan mengacu pada pengertian ideologi yang dikutip dari George A. Theodorson & Achilles G. Theodorson dalam *A Modern Dictionary of Sociology* (1979), yaitu :

*A system of interdependent ideas (beliefs, traditions, principles, and myths) held by a social group or society, which reflects, rationalizes, and defends its particular social, moral, religious, political and economic institutional interests and commitments. Ideologies serve as logical and philosophical justifications for a groups patterns of behaviour, as well as its attitudes, goals, and general life situation. The ideology of any population involves an interpretation (and usually a repudiation) of alternative ideological frames of reference. The elements of an ideology tend to be accepted as truth or dogma rather than as tentative philosophical or theoretical formulatios, despite the fact that ideologies are modified in accordance with sociocultural changes. (1979 : 195).*

- **Gerakan perempuan di Indonesia**

Sebelum menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan gerakan perempuan di Indonesia dalam penelitian ini, mungkin perlu dipertanyakan lebih dahulu apakah memang ada gerakan perempuan Indonesia pada masa Orde Baru (seperti yang ingin dilihat dalam penelitian ini)? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya masih merupakan perdebatan di kalangan aktivis pro-demokrasi dan aktivis perempuan sendiri (Muchtar, 2000;7-8).

Perdebatan ini sebenarnya berawal dari digunakannya definisi tradisional dalam gerakan sosial dimana gerakan massa dilihat sebagai salah satu indikator adanya gerakan perempuan. Namun mengutip Yanti Muchtar bahwa:

Definisi terbaru mengenai gerakan sosial mencoba melihat gerakan sosial secara lebih luas. Gerakan perempuan dan lingkungan hidup dikatakan sebagai gerakan sosial baru, karena walaupun seringkali tidak bermassa tetapi gerakan-gerakan ini telah mampu menumbuhkan kesadaran baru dikalangan masyarakat. Jadi kata kuncinya disini adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat. (Muchtar, 2000;7).

Dengan menggunakan definisi ini diasumsikan bahwa memang ada gerakan perempuan pada masa Orde Baru dan masa transisi.

Tentang gerakan perempuan dalam penelitian digunakan definisi yang dikemukakan oleh Alvarez dalam bukunya *Engendering Democracy in Brazil: Women's Movements in Transitions Politics* (1990)<sup>1</sup>

Sebuah gerakan perempuan adalah sebuah gerakan sosial dan politik, yang terdiri dari sebagian besar perempuan, yang memperjuangkan keadilan gender.

Dalam definisinya itu Alvarez tidak mengikutsertakan organisasi-organisasi perempuan milik pemerintah, organisasi-organisasi perempuan milik partai politik atau yang dibawah naungan organisasi massa tertentu, serta organisasi-organisasi lainnya yang tidak khusus bergerak dalam isu perempuan.

---

<sup>1</sup> Definisi ini dikutip dari tulisan Yanti Muchtar (2000:7).

Dalam penelitian ini, selain memilih dan menentukan beberapa organisasi perempuan yang diteliti, ingin dilihat juga organisasi perempuan di Indonesia secara umum. Organisasi-organisasi perempuan ini dalam pembahasannya nanti akan di letakkan sebagai penjelas kecenderungan arah gerakan perempuan di Indonesia dalam dua dekade ini.

## **Metode Penelitian**

Tidak mudah untuk menentukan ORNOP perempuan mana yang dipilih sebagai bahan kajian yang dianggap mewakili wajah ORNOP perempuan di Indonesia. Hal ini disebabkan sebagai bagian dari LSM pada umumnya. ORNOP perempuan bukanlah merupakan entitas tunggal dengan satu misi, visi, dan ideologi.

Namun merupakan lembaga yang amat sangat beragam. Dengan menyadari kenyataan itu maka akan dipilih ORNOP-ORNOP perempuan yang dianggap mewakili kriteria penelitian ini, yaitu:

ORNOP perempuan yang didirikan pada awal konsep pembangunan begitu marak. Secara historis ini penting karena dari sana akan didapatkan profil salah satu ORNOP perempuan yang dianggap "tertua" dengan konsistensi paradigma, visi, misi, dan praktik kegiatannya.

ORNOP perempuan yang memfokuskan kegiatannya pada persoalan-persoalan yang dianggap sangat strategis dan mendasar dalam memperjuangkan keadilan gender. Seperti persoalan Agama dan Kebudayaan, Pendidikan, Ekonomi (buruh, tenaga kerja), dan kekerasan terhadap perempuan. Persoalan-persoalan tersebut sangat penting, karena dianggap salah satu akar penindasan perempuan. Dan penyelesaian persoalannya harus dilakukan tidak

hanya sekedar “problem solving oriented” namun berjangka panjang dan penyarannya dilakukan secara terus-menerus.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka di sini dipilih 2 ORNOP perempuan yang dianggap mewakili gerakan perempuan di Indonesia, yaitu :

- (1) Rifka Annisa
- (2) Roempoen Tjut Nyak Dien

Penelitian ini dilakukan di dua daerah: Yogyakarta dan Jakarta. Dua daerah ini dipilih berdasarkan pertimbangan keduanya merupakan tempat lahirnya dan berkembangnya ORNOP-ORNOP perempuan yang sangat vokal menyuarakan keadilan gender di tanah air untuk pertama kalinya. Selain itu pertimbangan perbedaan latar belakang kultural yang memungkinkan analisis perbandingan hubungan kebudayaan dengan strategi-strategi yang dirumuskan oleh masing-masing ORNOP perempuan di dua kota tersebut. Daerah-daerah ini juga memperlihatkan perbedaan wilayah kebudayaan dan corak sistem sosial yang mempengaruhi proses konstruksi ekspresi-ekspresi simbolik (kebudayaan) dalam merespons berbagai persoalan gender di tanah air. Pada Jakarta penelitian lebih difokuskan kepada tokoh-tokoh ORNOP perempuan. Di Yogyakarta kajian lebih konsentrasi kepada organisasinya (kelembagaannya). Pemilihan tersebut berdasarkan pemikiran bahwa di Jakarta tokoh menjadi penting dan sentral dibanding Yogyakarta. Nama-nama seperti Nursyahbani Katjasungkana, Sita Kayam, lebih mengemuka ketimbang organisasi yang dibawanya. Nama LBH APIK, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menekankan pada pengamatan terlibat (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dalam pengumpulan data. Kedua

metode ini digunakan untuk mengungkapkan bentuk-bentuk dan alasan-alasan penggunaan “strategi” (ideologi dan implementasi di lapangan) dalam kerja yang dilakukan.

Selain itu di lakukan semacam metode sejarah kehidupan, khususnya sejarah organisasi, yang akan digunakan untuk melengkapi teknik pengamatan terlibat dan wawancara mendalam yakni dalam menggambarkan proses perubahan bentuk strategi organisasi dalam satuan waktu dan ruang sosial yang berbeda dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh ORNOP perempuan dalam merespons persoalan-persoalan dari waktu ke waktu.

Data penelitian akan dianalisis dengan metode interpretasi dengan melihat kaitannya dengan konteks kultural khususnya dengan melakukan perbandingan pada level keluasan (*scope*) dan kedalaman (*intensity*) data. Untuk melengkapi analisis, literatur-literatur yang membicarakan persoalan yang relevan tentang kasus yang berbeda di berbagai tempat, seperti Brazil, Amerika Latin, Afrika, India, dan negara-negara Asia Tenggara akan digunakan.

## Bab I – Pergolakan Ideologi Gerakan Perempuan di Indonesia Dalam Transformasi Sosial

## **BAB II**

# **GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA**

**S**ejarah tidak banyak mencatat peranan perempuan. Padahal, di masa revolusi gerakan perempuan sepenuhnya dikerahkan untuk mendukung agenda nasionalis. Perempuan bekerja di dapur-dapur umum yang secara vital menentukan ketahanan para gerilyawan. Mereka menyusup dan menyamar untuk menyelundupkan informasi strategis, menjadi mata-mata, merawat pejuang yang luka. Tak kurang perempuan yang mengangkat senjata. Pada Bab ini akan diulas tentang pergerakan Perempuan di Indonesia dengan memfokuskan pada GERWANI, sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia selama ini namun dalam perjalanannya dalam masa Orde Baru dibungkam melalui stigmatisasi dan pelabelan negatif yang sistematis. Selain itu akan dibahas serba sedikit tentang ORNOP perempuan pada masa Orde Baru. Pada masa ini ORNOP perempuan harus menyiasati segala kegiatan dan programnya dalam pemberdayaan perempuan.

### **I. Organisasi Perempuan dalam Perjuangan Nasional**

Unsur lain gerakan perempuan Indonesia yang sedang tumbuh ialah hasrat untuk emansipasi nasional. Organisasi perempuan yang pertama, Poetri Mardika didirikan pada tahun 1912. Organisasi ini ada hubungannya dengan organisasi yang telah disebutkan Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908. Namun sebelum organisasi Nasional ini berdiri, Kartini sudah sering mendengungkan gagasan-gagasan nasionalisnya. Dalam tahun-tahun berikutnya sesudah Poetri Mardika berdiri, bak jamur dimusim hujan berkembang biak organisasi perempuan. Majalah-majalah

perempuan terbit dimana-mana dengan tulisan-tulisan misalnya mengenai kejarnya perkawinan anak-anak dan perpaduan dan bermunculan perkumpulan-perkumpulan perempuan dengan nama-nama "Putri Sejati" dan "Wanita Utama"<sup>1</sup>

Di bawah ini ihtisar perkembangan gerakan perempuan di Indonesia hingga lahirnya Kongres Perempuan Indonesia Secara umum dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan pergerakan perempuan hingga Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada tanggal 22-24 Desember 1928 dengan mendirikan Perikatan Perkoempoelan Perempuan Indonesia (PPPI), Yogyakarta, yang sekarang terkenal dan diperingati sebagai hari ibu di Indonesia.

Iktisar Berdirinya Organisasi Perempuan Menurut Kronologi

No	Tahun didirikan	Nama	Sifat Keanggotaan	Pemrakarsa, Afiliasi, Kerjasama atau Hubungan
1.	1912	Poetri Mardika, Jakarta	Umum	Boedi Oetomo
2.	1915	Pawiyatan Wanito, Magelang	Umum	-
3.	1915	Jong Java Meisjeskring	Umum	Jong Java (Pengemudi)
4.	1917, 22 April,	Aisyiyah, Yogyakarta	Agama	Muhammadiyah
5.	1917, 8 Juli	"PIKAT" Pertjintaan Ibu kepada Anak Temurun, Manado	Umum	-
6.	1917	Purborini,	Umum	-
7.	1918	Syarekat Siti Fatimah, Garut 1925 : Syarekat Putri Islam 1936 : Gerwapsi (Gerakan Wanita Partai Syarekat Islam Indonesia 1962: Wanita Syarekat Islam	Agama	Partai Syarekat Islam Indonesia
8.	1918	Wanito Soesilo, Pematang	Umum	-
9.	1919	Wanito Soesilo, Jepara	Umum	-

<sup>1</sup> Lihat Saskia Wieringa, Kuntulanak Wangi organisasi-organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950, hal 19

## Bab II – Gerakan Perempuan Di Indonesia

10.	1919	Poetri Boedi Sedjati, Soerabaja	Umum	-
11.	1920	Wanita Oetomo, Yogyakarta		-
12.	1920	Wanita Moeldjo, Yogyakarta		-
13.	1920	Wanodyo Oetomo, Yogyakarta	Agama	Sarekat Islam
14.	1920	Gorontaloesche Mohammedaansche Vrouwenbeweging, Gorontalo	Agama	-
15.	1920	Syarekat Kaoem Iboe Soematra, Bukittingi	Umum	-
16.	1920	Nahdatoel Faat, Yogyakarta	Agama	Walfajrie
17.	1922, 3 Juli	Wanita Taman Siswa Yogyakarta	Isteri-isteri karyawati	Persatuan Taman Siswa
18.	1924, 26 Juni	Wanita Katolie, Yogyakarta	Agama	Partai Katolik
19.	1925	Damesafdeeling Jong Islamieten Bond (JIBDA), Yogyakarta	Agama (pemudi)	Jong Islamieten Bond
20.	1927	Mardi Kamoelian, Madiun	Umum	-
21.	1927	Ina Toeni	Umum	Syarekat Ambon
22.	1928, 5 Jan	Poeteri Setia, Manado	Umum	-
23.	1928, 5 Mei	"Wanita Pertiwi" (persatuan Tabiyah Islamiah)	Agama	Partai Islam Perti
24.	1928, 4 Juni	Wanita Sahati, Jakarta	Umum	-
25.	1928, 22-24 Des	Kongres Perempoean Indonesia Pertama mendirikan Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI), Yogyakarta	Umum, (Federasi)	-

## II. GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia)

Dalam sejarah Pergerakan Perempuan di Indonesia, GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) merupakan salah satu organisasi perempuan yang paling berpengaruh di Indonesia dan keberadaannya selalu dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sehingga kejatuhan PKI pada tahun 1965 diikuti pula oleh organisasi perempuan ini.

Ada beberapa penelitian tentang GERWANI selama ini di Indonesia, namun diantara penelitian tersebut adalah Saskia Wieringga yang telah berhasil membongkar dan menuliskannya dalam disertasinya yang telah dialih bahasakan *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*.

Pada bagian ini akan dipaparkan pernyataan Sulami yang dimuat dalam [www.sekitarkita.com](http://www.sekitarkita.com) yang menceritakan tentang seputar GERWANI dan perjuangan yang diusungnya selama ini. Sulami adalah mantan Sekretaris Jenderal Nasional Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia. Ia salah seorang pendiri dari LPKP '65, Lembaga Penelitian Korban Pembantaian '65. Pernyataannya sengaja dimuat dalam penelitian ini untuk menggambarkan pergolakan pemikiran dan perjuangan GERWANI dalam kurun waktu tersebut. Ada beberapa poin penting yang diutarakan Sulami disini, yang melatari pemikiran berdirinya, kiprah perjuangan, dan posisi GERWANI dalam konstelasi politik Indonesia saat itu.

Pertama, berdirinya sebuah organisasi wanita revolusioner sangat diperlukan oleh gerakan revolusioner pada masa setelah perjuangan bersenjata untuk kemerdekaan (1950), karena organisasi merupakan wadah dalam gerakan memperjuangkan cita-cita. Oleh karena itu wanita-wanita revolusioner yang kebanyakan pernah bergerak di bawah tanah selama pendudukan Belanda dan ikut serta dalam perjuangan bersenjata, berusaha untuk membangun suatu organisasi wanita revolusioner sebagai wadah untuk dapat menampung gerakan dan melancarkan perjuangan revolusioner dalam gerakan nasional untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sejati bagi Tanah Air dan Bangsa.

Pada masa sehabis perjuangan bersenjata tahun 1945-1950 wanita-wanita revolusioner tidak puas dengan organisasi-organisasi wanita yang ada, seperti Perwari, Wanita Sosialis, Wanita Demokrat Aisyah, Muslimat NU, dsb. Tetapi tidak berarti organisasi revolusioner itu akan berjuang menyendiri, semua organisasi wanita termasuk

organisasi istri-istri (AD, AURI, AL, AK) masuk dalam wadah Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).

Rasa kurang puas itu disebabkan beberapa faktor:

- (1) Kebanyakan organisasi wanita gerakannya terbatas soal-soal kewanitaan, ringan, monoton, tanpa risiko.
- (2) Hampir semua mempunyai program pendidikan, mendirikan sekolah-sekolah umum. Hal ini baik, namun bila terjadi hal-hal yang perlu diperjuangkan (secara politik), mereka tidak mau.
- (3) Mengenai hak-hak wanita. Tidak tergerak untuk membela wanita dalam kejadian sehari-hari, umpamanya kasus-kasus perkosaan, poligami, dan perkawinan anak-anak.
- (4) Tidak pernah ada aksi atau gerakan yang bersifat nasional secara bersama-sama.
- (5) Tidak mau membicarakan, apalagi mengadakan aksi menentang ijon di desa-desa, lintah darat, upah menuai padi yang sangat rendah, dan banyak problem kehidupan di desa dalam kehidupan wanita buruh tani yang sangat miskin.

Atas dasar pengalaman di atas, maka diluar organisasi wanita yang telah ada, dibentuk Gerakan Wanita Indonesia Sedar (GERWIS) sebagai organisasi wanita revolusioner yang segera mendapat sambutan hangat, terutama didesa-desa, dan cepat berkembang diseluruh nusantara (4 Juni 1950). Pendapat yang bisa kita simpulkan dari para aktivis dalam konferensi-konferensi kerja, kongres atau kursus-kursus kader antara lain sbb:

Dasar perjuangan wanita Indonesia adalah berdasarkan UUD '45, dimana kaum wanita dan pria memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam perjuangan nasional untuk penegakkan kemerdekaan Negara dan Bangsa.

Wanita Indonesia bukan penganut paham Feminisme yang perjuangannya bersifat memusuhi kaum lelaki demi persamaan hak. Justru wanita Indonesia harus bersama-sama kaum laki-laki dalam perjuangan nasional yang telah ditetapkan sejak 1928 (Sumpah Pemuda).

Pendapat mengenai arti feminisme saat itu memang sangat dipengaruhi oleh ajaran Bung Karno yang tertulis dalam buku "Sarinah" yang mengambil contoh perjuangan wanita Eropa sebelum Revolusi Perancis dan Amerika. Dan saat itu dunia juga belum menunjukkan gerakan wanita yang menganut Feminisme seperti tahun-tahun berikutnya. Pada saat itu kami di Indonesia masih bisa melihat wanita-wanita di Eropa, umpamanya di Swiss yang belum memperoleh hak-hak sepenuhnya seperti hak pilih, dan tidak dapat tanda tangan mengenai urusan finansial, hutang-piutang, dan sebagainya.

*(Catatan: Penulis saat itu bekerja di GWDS Berlin, 1958)* Di Swiss tidak ada gerakan apa-apa. Di Basel (Swiss) wanita belum punya hak pilih. Dalam Kongres Wanita Itali, utusan Swiss menyatakan hal tersebut (1960). Di Indonesia, buku perjuangan Clara Zetkin dari Jerman dipelajari dan Hari Wanita Internasional (8 Maret) mulai dirayakan di Indonesia sejak di Istana, sampai di desa-desa. (walaupun dalam arti sempit??) Tetapi harus juga diakui bahwa gerakan membela hak-hak wanita di Indonesia makin menarik perhatian wanita secara luas. Terutama soal menentang poligami sebagai sisa sistim feodal. Juga kaum lelaki ikut tertarik dan sering menghadiri ceramah-ceramah umum yang diadakan oleh organisasi. Ceramah-ceramah kadang berlangsung 4-5 jam termasuk tanya-jawab.

Pedoman ceramah pada dasarnya mengenai Perjuangan Nasional yang harus didukung kaum pria dan wanita, perlu diorganisirnya perjuangan membela hak-hak wanita menentang poligami, pelanggaran moral, masalah hak waris, menentang

kesewenang-wenangan, dsb. Soal hak anak-anak, pendidikan keterampilan, PBH, TK Melati dsb. Bersatu dengan kaum tani miskin meningkatkan kehidupan sosial kaum tani di desa-desa.

Ada sebuah pengalaman yang khas, tatkala Partai mengadakan gerakan pembersihan moral; Fungsiaris Partai tidak boleh poligami, tidak boleh memiliki tanah lebih, sehingga tidak dapat mengerjakan sendiri. Kader-kader wanita revolusioner yang terpilih ikut sibuk menangani perceraian secara damai. Sulit, tetapi bisa diselesaikan berkat kesadaran dan kesetiaan yang tinggi para fungsiaris serta istri-istri yang bersangkutan. Banyak liku-likunya, selesai dengan perasaan mendalam, kegetiran hidup yang tiada tara. Meski demikian, tiada air mata yang mengiringi perceraian, karena kedua belah pihak telah sadar. Bagi kader yang bertugas, merupakan pengalaman yang tidak akan hapus dalam kenangan.

Pengalaman perjuangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Sebuah gerakan yang hanya untuk membela hak-hak wanita tidak akan dapat menyelesaikan soalnya, bila tidak dibarengi dengan melawan sebab-sebabnya yang berakar. Yaitu sistim feodal yang masih tersisa di seluruh tanah air dan sistim ekonomi politik kolonialis dan kapitalistis.
- (2) Kolonialis Belanda mendukung RMS di Maluku dan OPM di Irian Barat. Gerwani mengadakan aksi-aksi menentang kenaikan harga kebutuhan pokok, menentang korupsi, tuan tanah, dan setan-setan desa.
- (3) Pengalaman telah menunjukkan bahwa dalam gerakan tersebut tidak ada organisasi wanita lain yang ikut serta dalam aksi-aksi. Juga Kongres Wanita tidak pernah mempersoalkan pelanggaran hak-hak wanita, seperti kasus Attamimi, perkosaan, serta pembunuhan di Jawa Timur, aksi-aksi tanah garapan di Tanjung

Morawa, dsb. Semua aksi-aksi tersebut dilancarkan Gerwani dengan mengerahkan massa di mana-mana. Sidang Kongres Wanita untuk memprotes Presiden Sukarno kami nilai sebagai aksi politik menentang kepemimpinan Presiden Sukarno.

- (4) Organisasi tidak setuju untuk menyebarkan protes tersebut dan jika diadakan pengambilan suara, kami tidak setuju. Akhirnya setelah perdebatan ramai dan diadakan *schorsing*, *statement* tidak jadi diadakan.

Pengalaman di atas menjadi pelajaran sbb;

- (a) Organisasi gerakan yang mempunyai tujuan luas secara nasional harus mempunyai pandangan luas pula, segala soal harus dilihat dari banyak segi, disesuaikan dengan keadaan konkrit pada masanya. Salah langkah bisa fatal akibatnya.
- (b) Berani menghadapi risiko. Pegangan pendirian yang kuat dan tidak mudah kena pengaruh.
- (c) Pengalaman baik atau buruk perlu disampaikan kepada aktivis di basis organisasi, sehingga semua yang terjadi dalam gerakan dapat dimengerti dan dijadikan bahan diskusi.
- (d) Suatu bukti, bahwa wadah organisasi revolusioner adalah mutlak.

Kedua, program perjuangan yang diputuskan oleh Kongres merupakan pegangan dari pusat sampai ke basis di desa-desa. pokok program adalah sbb:

- (1) Aktif dalam perjuangan nasional mencapai cita-cita revolusi Agustus 1945, kemerdekaan sejati, anti-feodalisme, kolonialisme dan imperialisme untuk mencapai terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
- (2) Membela hak-hak wanita, menentang poligami, penindasan, dan kesewenang-wenangan terhadap wanita, perkosaan membela hak waris, dsb.

- (3) Membela hak-hak anak-anak. Menentang kawin anak-anak, meningkatkan pendidikan, memperluas TK "Melati", gerakan PBH (Pemberantasan Buta Huruf) sedari anak-anak sampai orang dewasa.
- (4) Bekerja sama dengan organisasi-organisasi lainnya dalam hal perjuangan meningkatkan kehidupan kaum tani. Menentang pemerasan di desa-desa.
- (5) Meningkatkan kehidupan sosial budaya, ekonomi dengan aktif meningkatkan gerakan-gerakan yang semakin meluas, baik di pusat maupun di daerah.

Secara konkrit aksi-aksi tersebut antara lain adalah:

- (1) Aksi tanah di Sumatera Utara, Tanjung Morawa. Wanita tani dipimpin Ny. Maesi, ketua Cabang Gerwani ikut berbaris di depan untuk menghalangi traktor yang akan meratakan tanaman kaum tani. Aksi ini dipimpin oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) tahun 1955. Baik dari tentara, yang main tembak, maupun dari kaum tani sama-sama jatuh korban. Pentraktor berhenti menunggu panen dan semua masalah dirundingkan dengan Pemerintah dan Pihak Perkebunan.
- (2) Aksi tanah di Jengkol (Kediri, Jawa Timur) pada tahun 1957. Juga alat negara main tembak. Banyak yang luka, wanita yang meninggal seorang, bernama Sundari, yang luka banyak. Ada seorang wanita yang ikut delegasi menghadap Pemerintah Pusat.
- (3) Aksi-aksi menentang pengusuran tanah ladang dan tempat tinggal terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dsb. Karena aksi bersifat massal, maka seringkali yang ditangkap dan dipenjarakan juga bersifat massal. Seperti pernah terjadi di Jombang, Kediri, di Nganjuk lebih dari 600 orang, di Sragen sampai 400 orang, di Pati 200 orang, Kudus, dan Jepara  $\pm$  300 orang masuk penjara. Semuanya dibebaskan setelah Pemerintah Pusat dan Wakil-wakil DPR Pusat turun tangan dengan meninjau

lapangan dan penjara-penjara. Demikian pula di Indramayu, Jawa-Barat, rata-rata separuh jumlahnya adalah wanita. Berkali-kali utusan DPP Gerwani, DPD, dan cabang-cabang meninjau para tahanan untuk bertemu wicara dengan wanita tua-muda yang masuk penjara, bahkan ada beberapa yang pengantin baru, seperti di Kudus (terlihat dari bekas rias wajah dengan cukuran dahi sesuai tradisi Jawa). Juga suami-suami mereka masuk penjara. Daerah aksi tanah di Jepara sangat khas. Masuk ke daerah aksi tidak mudah. Melalui sungai dan hutan, memakai kode berantai sepanjang jalan untuk menentukan apakah yang datang itu kawan atau musuh aksi. Sesudah melalui menara penjaga di puncak pohon Jati yang besar sebagai penjagaan terakhir, maka kami melewati sungai dan sawah-sawah, yang membentang luas dengan tanaman padi yang menghijau. Tetapi ada tiga petak memanjang kosong yang memanjang dengan ujungnya jauh tidak tampak nyata, "Mengapa kosong tidak ditanami?" Jawabnya, "Itu milik tuan tanah. Kami petani di sini tidak sudi menggarapnya. Dia musuh kaum tani yang suka berteman Polisi Hutan, Polisi Negara, dan Tentara yang memusuhi kami. Biarlah tumbuh rumput dan mereka makan rumput, mereka memasukkan teman-teman kami ke dalam penjara sampai beratus-ratus. Silahkan ibu tengok teman-teman kami dipenjara. Dengan bantuan keluarga, kami bisa menemui mereka yang masih dalam penjara". Meski tersirat kegetiran hidup, tetapi wajah mereka tampak tetap bergairah tegak menyala. Mereka memandang puncak matahari di atas hutan Jati. Disanalah terpancang benang-benang emas yang menentukan kemenangan aksi mereka mempertahankan tanah garapan. Seluruh rakyat desa terikat erat dalam kesatupaduan jiwa. Tiga bulan penjara tidaklah lama. "Dua bulan lagi teman-teman akan bebas dan mereka akan kita sambut dengan pesta hasil panen tanah garapan ini, di tempat mereka diadakan secara massal di Balai Desa".

Terjadi pula "aksi bongkok" terhadap Kepala Desa yang sewenang-wenang terhadap warganya. Menarik uang sokongan untuk diri sendiri, jatah koperasi dikurangi, memalsu warisan tanah, memaki-maki rakyatnya sampai memukul warga, tidak pernah memberi sokongan. Suatu saat penduduk lelaki dan wanita sepakat untuk melakukan "aksi bongkok". Kepala Desa tersebut diikat dan digotong rame-rame dibawa ke kantor Kecamatan. Diserahkan kepada Pak Camat beserta surat protes serta tuntutan kaum tani agar kepala tersebut diganti. Pak Camat bijaksana, tuntutan diterima. Setelah diperiksa, Kepala Desa tersebut dipecat lalu diadakan pemilihan kepala desa baru. Namun aparat hukum menganggap rakyat Desa Singopadu, Sragen, Jawa-Tengah tersebut main hakim sendiri. Akibatnya ratusan orang ditahan. Setelah dari Pusat campur tangan, kaum tani yang ditahan tersebut dibebaskan (terjadi pada th.1963).

Agak merata aksi-aksi bagi hasil secara sepihak, yang memaksa tuan tanah memberi bagian kepada kaum tani penggarap lebih banyak, yang tadinya 40% menjadi 'maro' atau 50%. Dalam aksi-aksi tanah ini, menimbulkan rasa permusuhan antara pemilik tanah dan kaum tani penggarap yang pada umumnya tergabung dalam BTI dan Gerwani. Rasa permusuhan itu berlanjut sehingga menimbulkan rasa dendam. Bila kini (tulisan dibuat tahun 1992) mencari tokoh-tokoh aksi itu, sudah banyak yang mati, terutama menjadi korban pembantaian pada tahun 1965. Mereka telah menjadi rabuk perjuangan.

- (4) Aksi-aksi mengganyang setan desa dan setan kota mengikut sertakan beberapa organisasi massa revolusioner. Perlu diketahui, bahwa tidak semua anggota ormas revolusi itu komunis. Kebanyakan setuju dengan aksi itu dan mau ikut. Mereka adalah kaum buruh tani, pemuda, dan lain-lain. Para aktivis, kader serta pengurus ormas revolusioner tidak semuanya komunis, tetapi

setuju dengan perjuangan organisasi. Dan pimpinan yakin, pada akhirnya mereka banyak yang masuk Partai.

- (5) Aksi kenaikan harga di Jakarta dan di banyak kota sudah tentu tidak dikehendaki oleh Pemerintah. Pimpinan organisasi dipanggil dan mendapat kecaman (kritik), mengapa harus demonstrasi, menurut pendapat mereka, cukup usul pakai surat saja. Seperti halnya demonstrasi-demonstrasi 'basmi korupsi dan O.K.B (Orang Kaya Baru)' ke Kejaksaan Agung, diperingatkan oleh Pemerintah secara tajam meskipun tidak ada penangkapan.
- (6) Aksi protes kepada Pemerintah Jepang (didepan Kedutaan Jepang di Jakarta) soal intervensi ekonomi. Dalam demonstrasi ini Pemerintah mengambil tindakan dan menangkap lebih dari 50 orang (tahun 1958), tetapi tidak lama dibebaskan.
- (7) Aksi protes terhadap kecurangan Soudy (India) pada waktu Asian Games di Jakarta (tahun 1957) di muka Hotel Indonesia. Ditengahi oleh Adam Malik, saat itu sedang menjadi Dubes Indonesia untuk Soviet Uni. Beliau sanggup menyelesaikan, karena Soudy tidak ada di Hotel tersebut.
- (8) Aksi menentang intervensi AS di Indonesia -- demonstrasi (1957) tidak mendapat hambatan. Karena kantor Kedubes AS tutup, massa langsung ketempat kediaman Dubes. Wakil massa ditemui oleh Dubes AS, Jones. Semua surat protes dan tuntutan diterima dan dijanjikan untuk dilangsungkan ke Pemerintah AS. Tidak ada yang ditahan. Demonstrasi ini berjalan tenang tanpa diuber oleh Tentara, seperti halnya ketika demonstrasi di muka kedutaan Jepang.
- (9) Dalam melaksanakan program ceramah-ceramah organisasi di Kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia, juga menghadapi larangan-larangan dari Aparat Pemerintah setempat. Setidak-tidaknya harus berhadapan dengan polisi. Larangan itu timbul karena sebelumnya sudah ada prasangka jelek. Terutama sejak

garis NASAKOM dilancarkan oleh Pemerintah Presiden Sukarno (sejak sekitar 1960), maka ada saja kerewelan-kerewelan dikalangan alat-alat pemerintah di daerah. Tidak berani menentang secara terang-terangan, tetapi merintang dari segi pelaksanaan. Umpamanya pelarangan ceramah karena izin resmi sering diberikan mendadak, walaupun permohonan sudah diajukan seminggu sebelumnya. Sering dilarang memakai pengeras suara, tidak boleh bicara tentang poligami atau menyinggung perasaan orang lain. Dan masih banyak persoalan lain, sedangkan teks pidato diminta terlebih dahulu sebelum ceramah. Banyak larangan, tetapi, jika diminta larangan tersebut secara tertulis, pemerintah setempat menolak.

- (10) Aksi-aksi yang melanggar adat umumnya tidak terdapat, karena sebelum mengadakan aksi, organisasi mempelajari adat setempat terlebih dahulu dengan penuh perhatian. Umpamanya: peristiwa Attamimi, seorang warga negara keturunan Arab di Pesuruan, Jawa Timur. Ia memperkosa dan membunuh seorang gadis di Malang. Pengadilan pertama diadakan di Situbondo, Besuki, Jawa Timur. Daerah ini fanatik Islam, sehingga organisasi sangat perlu hati-hati. Tidak mengerahkan massa setempat, hanya rombongan delegasi dari DPP dan DPD yang datang, dengan jumlah lima orang. Ketika kami (anggota delegasi) berjalan lewat lorong kampung, di depan rumah wanita-wanita usia 40 tahun keatas, mereka bersikap tidak bersahabat, mengucapkan doa sambil menutup pintu. Ternyata di situ penduduknya banyak keturunan Arab, sedang yang kami tuntutan hukuman mati (Attamimi yang memperkosa dan membunuh) adalah keturunan Arab (Hadramaut, Saudi Arabia). Sedang di daerah itu belum bisa terbentuk ranting organisasi. Ranting yang ada hanyalah di sekitar pabrik-pabrik gula, dimana buruh-buruhnya kebanyakan pendatang dari lain daerah. Tawaran anti-poligami ditolaknya, karena dianggap anti-Islam, karena Islam membolehkan poligami hingga empat. Yang mereka

tidak mengerti ialah, bahwa boleh kawin sampai empat tetapi syarat-syaratnya sangat berat. Sesudah melalui pengajian-pengajian dijelaskan keterangan dalam Al Qur'an. Baru mereka sadari dan di daerah fanatik ini akhirnya terbentuk ranting-ranting dan cabang, walaupun tidak secepat di pulau Jawa perluasannya.

- (11) Aksi-aksi yang langsung mengenai kepentingan wanita rumah tangga. Kaum ibu yang tidak bekerja di kantor, pabrik, perkebunan tembakau, dll, umumnya hidupnya tergantung suami. Kalau suami mempunyai penghasilan tetap, meski tidak cukup, ada yang dijagakan untuk belanja hidup. Kalau kebetulan suaminya aktivis organisasi, jelas bahwa rumah tangganya selalu kekurangan, jika istri tidak membantu usaha. Oleh karena itu, kader-kader wanita organisasi harus jeli dan pandai mencari jalan pemecahan. Banyak yang dapat dilakukan, umpamanya melalui pendidikan ketrampilan, membuat baju renda untuk anak-anak seperti di Jepara, membuat bahan lurik seperti di daerah Klaten, berdagang kue-kue, menjadi agen koran, cocok tanam yang produktif, membuat lumbung-lumbung paceklik, mengumpulkan beras secara jumptan (tiap hari satu jumpt-pengambilan dengan tiga jari, Jempol, telunjuk, jari-tengah). Sekali terbuka jalan, mereka akan terus berkembang. Suami-isteri saling membantu. Pertentangan kecil-kecil dapat diatasi, kalau tidak dapat selesai, minta bantuan kader-kader lainnya.
- (12) Khusus pada saat Partai mengambil sikap tegas terhadap kader-kader fungsionaris atasan dan bawahan mengenai penyimpangan moral, benar-benar telah membuat kesibukan luar biasa. Sebelum diadakan tindakan konkrit, dibicarakan dahulu matang-matang. Kader-kader wanita pun siap membantu. Ini merupakan gerakan anti-poligami dalam tubuh organisasi yang kenyataannya tidak mudah dilaksanakan. Tidak cukup waktu satu bulan untuk satu kasus. Perceraian antara suami-istri merupakan hal yang menyangkut persoalan hati, perasaan, persoalan anak dan

pengorbanan besar. Beberapa contoh dapat dikemukakan, antara lain:

- a. Didaerah Jawa Timur ada seorang fungsionaris masih muda, kaya dan bekerja sebagai Carik Desa. Dia mempunyai dua isteri. Yang pertama punya anak empat, tidak aktif dalam organisasi tetapi menjadi anggota atas permintaan suaminya. Isteri keduanya memang aktivis, pandai berpidato dan berorganisasi. Karena program organisasi anti-poligami, dia sadar bahwa dia bersalah menjadi isteri kedua. Timbulnya pertentangan batin yang hebat menyebabkannya sering sakit. Ketika ada instruksi dari Pusat bahwa meskipun saling cinta, isteri kedua harus dicerai, maka dalam pelaksanaan selalu diundur-undur dengan alasan sakit. Setelah beberapa bulan dibantu kader atasan untuk menyelesaikan, kebetulan ada Konferensi Kerja organisasi se-Jawa Timur dan dia harus ikut mempersiapkan, suami mengantarkan dengan memboncengkan sepeda kemana ia pergi karena belum sehat betul. Alhasil perceraian tertunda-tunda. Penulis yang bertugas memiliki akal dengan cara membuat cerpen setengah fiktif. Isteri muda diceritakan sakit pingsan hingga masuk Rumah Sakit. Sedang suaminya dikritik teman-temannya dengan menyimpulkan bahwa dia harus menceraikan isteri mudanya kalau tidak mau dipecat Partai. Akhirnya disepakati untuk cerai dengan baik-baik. Suami tetap fungsionaris dan bekas isteri muda tetap aktivis organisasi wanita dan lebih bebas berbicara anti-poligami. Ketika Bu Carik yang muda membaca cerpen tersebut di harian Rakyat, maka ia sadar dan meminta agar bersama-sama dengan suaminya ke Penghulu untuk menyelesaikan perceraian. Legalah semua kader yang bersangkutan.
- b. Ada sebuah kisah lainnya. Perceraian dengan isteri muda yang justru mempunyai empat anak, sedang isteri tua tidak

mempunyai anak. Kedua wanita tersebut aktifis. Meskipun suaminya berpangkat tinggi dalam pemerintahan, dia terkena disiplin. Dan mereka mempunyai kisah hidup yang unik. Dalam masa perang gerilya, karena dua-duanya satu rumah, maka anak-anak diasuh bersama, bahkan dengan isteri tua lebih dekat, karena isteri muda aktif dalam organisasi sehingga sering bertugas keluar rumah. Sedang yang tua sebagai pendamping suami, sering menonjol, jadi tidak begitu aktif dalam organisasi. Disiplin telah menjatuhkan pilihan kepada isteri pertama untuk tetap menjadi Ibu pejabat. Sedang isteri kedua dicerai dengan membawa anak bungsu yang baru berusia 7 bulan. Sementara ketiga anak lainnya tetap diasuh ayah dan ibu tua. Riwayat demikian memang menyedihkan. Maka organisasi wanita menampung persoalannya dan membantu agar bekas isteri muda tadi tidak frustrasi. Dicarikan pekerjaan di lain kota dan dibimbing agar tidak dendam. Ia menyadari bahwa menjadi isteri orang yang sudah bersuami adalah suatu kesalahan dan ia harus menanggung risikonya. Perceraian semacam itu banyak terjadi. Ada yang mulus, tetapi ada pula yang tidak. Tetapi pada umumnya, meskipun berat, para fungsionaris itu patuh kepada disiplin Partainya.-Kecuali 1 orang yang memiliki nama baik, memililih dipecat dan direcall dari DPR pada tahun 1963-. Dengan disiplin keras dalam pengalaman itu, maka wanita merasa aman untuk menjadi isteri orang Partai.

Ketiga, pengaruh perjuangan terhadap kehidupan pribadi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- (1) Suami-isteri sama-sama revolusioner, sama-sama aktif.
- (2) Suami seorang revolusioner, sedang isteri bukan, atau belum.
- (3) Suami-isteri didukung oleh keluarga.

- (4) Suami isteri dalam perkawinan tidak didukung sepenuhnya oleh keluarga.

Uraianya sebagai berikut:

- (1) Perjalanan hidup dalam rumah-tangga banyak liku-likunya. Kalau keduanya sama-sama aktifis revolusioner, tidak terdapat ribut-ribut soal meninggalkan rumah karena tugas, saling pengertian serta ada kebanggaan tersendiri mempunyai suami atau isteri maju, aktif, pandai, tangkas, dan sehat yang menjadi idaman setiap kader, sehingga kekurangan-kekurangan kecil dapat diabaikan. Namun hal ini juga tidak dapat seratus persen mulus, ada saja yang rewel, meskipun sudah sama-sama revolusioner. Hal ini dapat dimengerti karena sisa-sisa feodalisme itu masih ada, maunya saling cari enak. Tetapi meski ada pertentangan, tidak sejauh hingga cerai. Jarang terjadi perceraian, meskipun kaya ataupun punya kedudukan tinggi.
- (2) Suami atau isteri belum atau bukan orang revolusioner. Keduanya harus berani berkorban perasaan. Pernah terjadi, pulang rapat tidak dibukakan pintu rumah. Masing-masing perlu kesabaran yang besar. Kalau wanitanya orang biasa, kesulitan akan bertambah, karena biasanya menjadi isteri pencemburu. Suatu ketika ada laporan suatu kasus, bahwa seorang isteri aktifis akan masuk sumur, jika suami terus-menerus meninggalkannya untuk rapat. Ketika suaminya marah dan berkata kalau ia tidak bisa dilarang rapat, kalau isterinya mau masuk sumur, dipersilahkan. Isterinya menangis sambil mengumpat bahwa suaminya sudah tidak mencintainya lagi dan berarti sudah punya pacar lain. Suaminya meminta bantuan kader wanita yang lebih atasan agar bisa menasihati isterinya. Ketika ada kunjungan ke daerahnya, ia meminta kader wanita tersebut untuk menginap dirumahnya. Semula isterinya menerima dengan cemberut. Tetapi kader wanita tersebut mencoba untuk dari hati kehati dengan wawancara pribadi tentang keluarga, ekonomi, dsb. Dengan

pengalaman beberapa kali kunjungan, setelah tiga bulan, isteri tersebut mulai sadar dan mengerti mengapa suami sebagai orang perjuangan harus sering meninggalkan rumah. Bagaimana menarik isteri menjadi anggota organisasi wanita atau tidak merintangi suami ternyata lebih mudah dari pada sebaliknya untuk menarik suami agar tidak merintangi isterinya menjadi aktifis. Pengalaman pada umumnya membuktikan bahwa di Indonesia kedudukan suami adalah kepala rumah tangga. Ia wajib mengatur, membiayai, bertanggung-jawab sepenuhnya dan menghidupi isteri dan anak-anaknya.

Istri yang kader wanita, kalau tidak ada kemampuan untuk mengungguli suami, kedudukannya menjadi lemah. Meski alasan pertama adalah saling mencintai dalam keluarga, kalau tidak didukung oleh hal-hal lainnya, umpamanya, pengetahuan, ekonomi, ketrampilan, cinta bisa menipis. Karena suami tidak punya landasan ideologi yang sama, apalagi kalau berideologi lain, lebih sulit bagi sang isteri. Oleh karena itu diantara kawan lelaki dan wanita ada solidaritas untuk saling menjaga, meskipun ada kalanya ada penyelewengan moral, baik didaerah maupun di pusat.

- (3) Perkawinan yang didukung oleh keluarga sangat baik. Bagi suami istri pejuang dapat lancar bertugas, karena jika ada anak, sewaktu meninggalkan rumah dapat dititipkan kepada neneknya, yang tidak akan merintangi perjuangannya. Sebaliknya, jika tidak didukung keluarga, tidak mendapatkan restu, maka keduanya harus berani mandiri, berkorban perasaan, militan, dan berani menghadapi segala kesulitan.
- (4) Proses menyadarkan keluarga yang tidak mendukung perkawinan suami atau isteri yang revolusioner akan memakan waktu lama. Kadang-kadang sudah punya dua anak pun belum bisa diterima oleh keluarga. Perjuangan intern keluarga adalah perjuangan yang melelahkan, perjuangan merubah pikiran yang tidak mudah.

Paling tidak kader yang ditentang harus dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya menganut paham dan organisasi yang baik. Segala tindak tanduknya harus tidak tercela, syukur bisa menjadi contoh. Barulah mereka yang anti akan lunak, bagaikan gunung es yang mencair. Lebih berat lagi jika yang ditentang itu kader wanita. Untuk itu kader wanita harus berprestasi baik, bermanfaat bagi orang banyak dan tetap tegar dalam perjuangan. Baru mereka yang anti akan menyadari dan mengucapkan: "Itu bagus, saya tidak mengira". Soal penderitaan, kelelahan, ejekan, dan berbagai macam kesulitan banyak dialami kader wanita karena tradisi tanah air menghendaki wanita tempatnya dibelakang, mengurus suami dan anak. Hal-hal di atas pernah dijadikan tema dalam suatu Seminar Wanita Rumah Tangga yang diadakan oleh Gerwani pada akhir tahun 1963.

Keempat, Kesadaran tumbuh dan berkembang dengan tempaan dalam perjuangan kaum wanita Indonesia pada umumnya mengenal riwayat pendekar wanita 'Ibu Kartini'.

Sejak jaman penjajahan Hindia Belanda, hari Kartini 21 April diperingati. Selanjutnya mengenal karya Bung Karno 'Sarinah', maupun buku-buku tentang pahlawan dan pejuang-pejuang wanita lainnya. Tulisan-tulisan S.K. Trimurti banyak membantu mengenal perjuangan wanita. Hanya wanita-wanita di pedesaan dan daerah terpencil mengenal para pejuang wanita itu baru semenjak adanya organisasi revolusioner memasuki desa dan pelosok, karena kebanyakan wanita tidak bersekolah. Pengenalan lebih lanjut dengan tokoh wanita internasional yang kemudian diperingati setiap tanggal 8 Maret sebagai Hari Wanita Internasional dengan tokoh Clara Zetkin.

Kelima, Perjuangan bersenjata melawan penjajahan Belanda pada periode 1945 hingga 1949 selama *clash* ke I dan ke II (1947-1949) wanita-wanita ikut serta.

Demikianlah tahun 1950 sudah matang untuk terbentuknya sebuah organisasi wanita revolusioner. Perkembangan kader wanita

menjadi kiri, tengah atau kanan sangat ditentukan oleh tempaan perjuangannya, aktivitas maupun lingkungannya. Asal kelas kadang-kadang terisisih karena banyak yang berasal dari kelas borjuasi kemudian tertempa menjadi pejuang revolusioner. Jadi mutasi kelas bisa terjadi. Sebaliknya, yang asal kelas buruh kecil dalam keadaan materi ekonomi menjadi bagus, tidak jarang yang beralih menjadi keluarga yang mirip feodal atau OKB dan pilih-pilih dalam menerima tugas organisasi. Sejarah Perkembangan kader memang panjang hingga bisa memiliki dedikasi penuh, militan, dan tidak mengabaikan tanggung-jawabnya dalam rumah tangga.

Keenam, Baik kader maupun anggota biasa mempunyai naluri keibuan yang sama-sama mencita-citakan membina rumah tangga yang tenteram, serasi, dan bahagia.

Hal ini bisa diselenggarakan jika suami-isteri utuh sepeham dalam membentuk keluarga revolusioner, tidak banyak pertentangan. Jika masuk sesuatu organisasi, tentu memilih yang gerakannya maju dan membela kaum wanita serta anak-anak yang tertindas. Mereka merasa aman dalam ikatan suami-isteri bila menjadi anggota organisasi wanita revolusioner. Karena jika ada celakanya, ada yang membela. Juga suami merasa tidak enak bila menyeleweng, karena takut diramalkan. Selain itu, mereka juga merasa bahwa isterinya akan setia karena dibina organisasi. Jadi kedua-duanya merasa terlindungi. Suami atau isteri dapat mengadu kepada organisasi jika salah satu kurang beres. Mengurus suami, anak, orang tua, dan lain-lain diterima sebagai kewajiban seorang ibu. Jika isteri bisa menyampaikan persoalan rumah tangganya kepada suami, meskipun anak banyak, bisa diatur pekerjaan rumah tangga dengan bantuan suami. Dalam rumah tangga pada umumnya, jarang suami mau membantu isteri, seolah-olah dibawah martabatnya. Dalam keluarga yang revolusioner, jika isteri bertugas, bisa dibantu teman sesama organisasi untuk urusan rumah tangganya. Sering timbul juga kesulitan. Kalau tidak bisa diselesaikan antara suami dan isteri, bisa

dibawa ke organisasi untuk dipecahkan dan diatasi. Hidup seorang ibu rumah tangga merangkap aktivis dan kader, memang tidak seperti wanita biasa. Mereka harus berani menghadapi kesulitan ganda dan memecahkannya secara kolektif. Jika pertentangan memuncak hingga diambang perceraian, dengan bantuan pemecahan dari organisasi, maka seringkali bisa membatalkan niat cerai setelah berunding secara tuntas.

Ketujuh, Pemimpin organisasi revolusioner pada umumnya memang wanita-wanita pejuang pada jamannya.

Terbentuknya GERWIS merupakan fusi dari tujuh organisasi wanita yang memiliki sejarah heroik melawan Belanda, baik sebelum perang kemerdekaan maupun selama perang bersenjata melawan Belanda th 1945-1950. Dalam perang atau damai mereka tetap berjuang aktif. Pada tanggal 4 Juni 1956 terbentuklah Gerakan Wanita Sedar (GERWIS) di Semarang, dipimpin oleh Ibu SK Trimurti, Sri Panggian, Umi Sarjono, Tris Metti, dan lain-lain. Program perjuangannya meliputi hak-hak wanita serta hak anak-anak dan perdamaian, dalam negara yang merdeka dan masyarakat yang adil sejahtera. Dalam perkembangan selanjutnya, sebagian ingin perubahan nama Gerwis, agar lebih mencakup wanita pada umumnya lebih luas. Pada tahun 1951, pada Kongres di Surabaya (Ke-1) secara prinsip disetujui, tetapi karena tidak bulat, perubahan nama ditunda hingga Kongres berikutnya tahun 1954 di Jakarta, yang kemudian berubah menjadi Gerwani. Masa setelah itu, mengenal perkembangan gerakan nasional melawan kolonialisme, imperialisme, dan feodalisme lebih dipacu. Tahun-tahun selanjutnya mengalami perjuangan politik dengan garis NASAKOM, yang dicetuskan oleh Presiden Sukarno, dan lahirnya Undang-undang Kepartaian dan Keorganisasian tahun 1965. Ada ketentuan bagi organisasi massa untuk berafiliasi dengan partai yang seiring programnya. Suasana politik ditanah air semakin hangat. Terjadi pengelompokan sesuai NASAKOM.

Kedelapan, Dalam pergolakan politik selanjutnya, setiap organisasi wanita memilih Partai Politik yang menjadi pelindungnya.

Kalau Wanita Marhaen memilih Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan Muslimat NU memilih Nahdhatul Ulama (ketika itu sebuah Partai), maka bagi Gerwani tidak ada jalan lain kecuali memilih Partai Komunis Indonesia (PKI). Sedang dalam PKI sudah ada Wankom (Wanita Komunis-ed). Pertentangan didalam organisasi sesungguhnya sudah ada sejak Kongres I di Surabaya, dalam menentukan perubahan Gerwis menjadi Gerwani. Juga pergantian Ketua dari SK Trimurti ke tangan Suwarti, menimbulkan debat sehingga ada mosi tidak percaya dari beberapa cabang. Pemecahannya, soal ganti nama ditunda hingga Kongres berikutnya (1954). Ibu Trimurti tampak pasif dan pada tahun 1957 mengundurkan diri dari kepengurusan, bahkan pada konferensi kerja tahun 1957 di Jakarta, dia mengundurkan diri sebagai anggota Gerwani. PKI tidak ada pertentangan terutama didaerah-daerah. Karena pada hakekatnya, semua kader menerima garis Nasakom. Dengan argumentasi, bahwa PKI selalu menyokong gerakan wanita revolusioner, terutama dalam aksi-aksi. Maka dengan Pemilu 1955, calon-calon wanita yang dari Pengurus Gerwani, masuk dalam tanda gambar PKI (Palu Arit). Soal gerakan feminisme tidak pernah masuk dalam agenda diskusi, rapat, dan konferensi, atau Kongres. Di Indonesia, arti istilah ini tidak ada dalam bentuk organisasi wanita. Yang ada organisasi wanita sosialis yang berhaluan kanan, anti kepemimpinan Bung Karno. Partai Sosialis sendiri tidak massal, tetapi banyak kader-kadernya kaum intelektual lulusan Universitas Indonesia (UI) dan memegang kunci posisi penting dalam ekonomi. Bung Karno tidak pernah menindak tegas musuh-musuh politiknya. Hanya ketika nyata-nyata mengadakan kerjasama untuk menggulingkan Presiden Sukarno, dan surat kabarnya setiap hari menyerang pemerintah, maka tindakan dilakukan terhadap tokoh-tokohnya seperti Syahrir, Subagio Sastroutama, Maria Ulfah Santosa, dan sebagainya.

Kesembilan, Dalam perjuangan di lapangan, apa saja bagi kader-kader pelaksana lapangan yang terasa sangat menggembirakan adalah suksesnya pekerjaan.

Baik itu mengenai peluasan organisasi, aksi-aksi di desa dan kota, aksi-aksi dengan bekerja sama dengan organisasi lain, umpamanya aktif dalam perjuangan merebut Irian Barat (1962), Dwikora (Konfrontasi dengan Malaysia tahun 1964/65), membantu TNI dalam menumpas pemberontakan PRRI-Permesta (1957/58), RMS (1956), DI-TII (tahun 1951). Kerjasama dalam memperingati hari-hari besar nasional, seperti hari Kemerdekaan 17 Agustus, hari Buruh (1 Mei), hari Kebangkitan Nasional (20 Mei), hari Kartini 21 April, hari Wanita Internasional (8 Maret), hari Ibu 22 Desember, dan sebagainya. Juga dalam menyambut tamu-tamu agung untuk Sidang Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955), Festival Film Asia-Afrika dalam Front Nasional DPR/DPRD, DPA, Kongres Wanita, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat nasional. Mengenai hari Wanita Internasional, Kongres Wanita tidak menyetujui dirayakannya. Gerwani merintis mengadakan kerjasama untuk peringatan tersebut dengan beberapa organisasi wanita yang setuju, dengan mengadakan wadah koordinasi Badan Kontak Gerakan Massa Wanita, dengan tokoh-tokoh Ratu Aminah Hidayat (Panitia Perdamaian), Aruji Karta Winata (PSSI-Wanita), Ny. Maruto Nitimiharjo (Wanita Murba), Ny. Mandagie (perorangan), dsb. Peringatan diadakan di Gedung Olah Raga dan di Istana Negara, dengan sambutan Presiden Sukarno (tahun 1963). Keberhasilan tersebut, meskipun melampaui banyak rintangan, merupakan hal yang menggembirakan. Dengan banyaknya kegiatan, maka organisasi Gerwani cepat meluas sampai ke desa-desa. Beberapa tahun menjelang 1965 organisasi memang sangat disibuki oleh latihan-latihan sukarelati (sukwati Dwikora) yang diadakan bersama organisasi-organisasi wanita lainnya dengan dukungan Pemerintah, Front Nasional, dengan *training centre* oleh masing-masing organisasi. Sebelum itu, dalam rangka Trikora, organisasi mengirim

sukwati-sukwatinya ke Irian Barat, dan untuk Dwikora ke Kalimantan Barat dan Riau. Yang paling menyedihkan adalah tragedi 1965, pada saat organisasi sedang mekar-mekarnya. Pada saat itu, beribu kader wanita tanpa mengetahui sebab-musababnya, di desa dan kota, terkena akibat G30S, dibantai tanpa ampun. Partai dan ormas revolusioner hancur. Ratusan ribu tewas, disiksa sampai mati, dipancung, dipicis (umpamanya di Boyolali), ditembak, dan dibunuh secara massal. Jutaan keluarga revolusioner menjadi korban kebiadaban. Mereka adalah orang-orang tak bersalah, tidak mengerti seluk beluk politik atasan (pusat). Air Bengawan Solo, Air Sungai Berantas, menjadi merah karena darah korban, berhari-hari mayat hanyut di alur Bengawan. Kebiadaban tersebut dikutuk di banyak bagian dunia, kecuali mereka yang setuju atau mendukung Pemerintah Orde Baru, diktator militer Suharto bersama teman-temannya. Seandainya memang partai Komunis membuat kesalahan, namun pembantaian terhadap segenap anggota serta simpatisannya adalah diluar hukum manapun. Pembantaian jutaan manusia adalah pelanggaran berat HAM (Hak Asasi Manusia). Fitnah merajalela. Jalan sejarah diputar-balikkan oleh 'ahli sejarah' yang mengabdikan pada kekuasaan militer. Semua jasa para korban dalam melawan penjajahan Belanda dan fasis Jepang, serta perang kemerdekaan dihapuskan. Bintang-bintang jasa sudah tidak berarti bagi mereka yang dianggap terlibat G30S, segala yang berbau revolusioner atau 'kiri' dimatikan. Terjadinya tragedi nasional membuat nama Indonesia tercemar di dunia, dan terus timbul kekerasan, kerusuhan, pemerkosaan, yang tidak henti-hentinya. Bagi kita para korban, yang pernah tersiksa dan sengsara, tidak boleh putus asa. Hidup perlu diperjuangkan. Generasi muda perlu mempelajari dan mengetahui sejarah masa silam yang sebenarnya, yang ditulis secara jujur, agar generasi penerus tidak salah menilai. Penulisan yang sebenarnya menjadi beban para pelaku sejarah yang masih hidup. Sedikitnya, bisa memberi fakta dan data pada pakar sejarah, agar penulisan sejarah menjadi benar. Umpama saja, aksi-

aksi tanah yang terkenal di Tanjung Morawa, Sambi Boyolali, Jengkol (Kediri), perlu diketahui yang sebenar-benarnya. Pengorbanan kaum tani untuk mempertahankan tanah garapan bisa kita ikuti dari masa ke masa hingga saat ini. Meski kalah, mereka tercatat dalam sejarah yang sekali waktu akan terungkap secara jujur.

Dalam dua dasawarsa terakhir kita menyaksikan fenomena yang luar biasa, bagaimana sebuah gagasan mendominasi dan mempengaruhi pemikiran secara global, khususnya di dunia ketiga. Gagasan itu disebut *development* yang nyaris menjadi "agama baru". Istilah *development* yang tersebar dan dipergunakan sebagai visi, teori, dan proses yang diyakini rakyat di hampir semua negara ini sejak semula dikembangkan tanpa mempertimbangkan masalah jender dan telah menimbulkan akibat dan hasil yang berbeda antara kaum laki-laki dan perempuan. Akibatnya pembangunan yang semboyannya untuk menyejahterakan dan menjawab tantangan kemiskinan dan keterbelakangan bangsa-bangsa dunia ketiga tersebut justru telah mengakibatkan keterbelakangan kaum perempuan.

*Women in Development* (WID) yang dicitakan sebagai jawaban atas kritik terhadap pembangunan (*Developmentalism*) juga telah dianggap gagal melaksanakan tugasnya, karena program ini hanya mampu menjawab persoalan dan kebutuhan praktis jangka pendek kaum perempuan. Tanpa analisis jender, diskursus pembangunan telah gagal menjawab kebutuhan strategis kaum perempuan, yakni kebutuhan jangka panjang untuk mentransformasikan baik keyakinan dan ideologi ketidakadilan gender maupun struktur kekuasaan yang tidak adil yang dibangun berlandaskan keyakinan dan ideologi gender.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, pantas dicatat dua peristiwa penting yang dianggap sangat mempengaruhi kedudukan dan peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta kebijaksanaan pembangunan di seluruh dunia.

Pertama, diumumkankannya *Human Development Report, 1995* yang secara khusus mengulas "Kesenjangan Gender Global" pada 17 Agustus 1995 di Oslo dan Washington. Dalam laporan itu dikemukakan bahwa paradigma pembangunan manusia yang menempatkan manusia sebagai titik sentral perhatian, masih dipenuhi kesenjangan gender. Secara tajam diberikan fokus pada kedudukan perempuan dengan menggunakan dua ukuran baru pembangunan manusia, yakni:

*Genderrelated Development Index* (GDI-Indeks Pembangunan yang berkaitan dengan Gender), mencerminkan ketimpangan gender dalam bidang kesehatan dasar, pendidikan, dan pendapatan. Tahun itu GDI memperingkatkan 130 negara. Indonesia masuk dalam peringkat 68 dengan nilai 0,591 (nilai maksimum 1).

*Gender Empowerment Measure* (GEM-Ukuran Pemberdayaan Gender), yang mengevaluasi kemajuan suatu bangsa dalam bidang ekonomi dan politik. Tahun itu GEM memperingkatkan 116 negara dan Indonesia pada peringkat 56 dengan nilai 0.362.

Dinyatakan dalam laporan itu bahwa visi yang menjadi inspirasi hubungan gender pada abad ke-21 adalah orde dunia baru yang menjamin kesetaraan penuh dalam kesempatan antara perempuan dan laki-laki sebagai konsep dasarnya (Kompas, 18 Agustus 1995).

Kedua, diselenggarakannya Konferensi Dunia IV tentang perempuan tanggal 4-15 September 1995 di Beijing. Konferensi itu diharapkan dapat menghasilkan suatu *Platform for Action: Equality, Development, and Peace*, suatu komitmen dunia untuk melakukan tindakan strategis yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat Internasional, masyarakat sipil termasuk organisasi non pemerintah dan sektor swasta. Kedua peristiwa itu menunjukkan adanya konsensus global bahwa selama ini pembangunan telah mengabaikan bagian penting dari sumber daya manusia untuk turut menikmati kemajuan dan hasil pembangunan.

Di Indonesia sendiri kata “pembangunan” menjadi diskursus yang dominan dan erat kaitannya dengan lahirnya Orde Baru. Kata pembangunan kemudian menjadi sangat tergantung pada konteks siapa yang menggunakan dan untuk kepentingan apa. Untuk itu studi gender di PMB ingin memosisikan diri pada wilayah kajian Gender dan Pembangunan. Persoalannya sekarang apa yang membedakan atau apa yang menjadi kekhususan studi ini dibandingkan dengan studi/kajian sejenis yang ada? Apa yang menjadi fokus kajian dalam gender dan Pembangunan ini?

Seperti ditegaskan oleh Melani Budianta misalnya, di masa Orde Baru, barangkali lebih mudah bagi kita membayangkan posisi perempuan. Ada organisasi-organisasi seperti PKK yang secara khusus mengarahkan peran perempuan untuk mendukung target-target pembangunan. Termasuk di sini target KB yang menghitung kepatuhan tubuh perempuan untuk dipasang alat kontrasepsi secara statistik sebagai ukuran suksesnya. Organisasi Kowani yang semula merupakan pejuang-pejuang pioner isu-isu perempuan dibelokkan oleh negara untuk mendukung apa yang disebut Julia Suryakusuma sebagai ideologi Ibuisme. Dalam era Orde Baru perempuan yang ideal adalah yang mendukung karier suami, yang menjadi ibu dan pengurus rumah tangga yang baik, yang melahirkan anak-anak bangsa. Kedudukannya sebagai warga negara tidak mendapatkan prioritas utama. Membayangkan perempuan di masa Orde Baru adalah membayangkan lukisan *Kartini* versi Dede Eri Supria (*Kartini* yang terperangkap di bawah alat pemanas rambut dan lipstik), atau perayaan-perayaan *Kartini* yang penuh ritual dan lomba-lomba memasak. menaklukkan atau menundukkan kelompok-kelompok yang dicap sebagai "musuh."

Di masa Reformasi, kita tidak perlu membayangkan-bayangkan, sebab masih terlalu dekat dalam benak kita bayang-bayang peristiwa Mei 1998 dan berbagai kekerasan di Aceh, Timor Timur, Kalimantan, Ambon, Irian Jaya. Selama tiga puluhan tahun kita tidak pernah diberi

kesempatan untuk memikirkan bahwa militerisme di balik pembangunan dan ibuisme dapat meledakkan begitu banyak korban, terutama kaum perempuan.

Dalam situasi konflik dan kekerasan yang merebak di akhir abad ke-20 di Indonesia, tubuh perempuan telah menjadi arena untuk menciptakan teror, Sejarah pergerakan perempuan Indonesia biasanya dibahas dengan menepi perkembangan Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Federasi ini telah berlangsung sekian lama, mencakup sekian banyak organisasi yang beraneka warna, mempunyai dokumentasi yang cukup lengkap yang mencerminkan pasang surut pergerakan perempuan sejalan dengan kehidupan masyarakat umumnya.

Perhatiannya diberikan kepada hampir seluruh bidang kehidupan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan perempuan: kesejahteraan keluarga, kedudukan perempuan dalam hukum, pendidikan perempuan, (termasuk pemberantasan buta huruf), tenaga kerja perempuan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, persoalan masyarakat seperti narkoba dan kenakalan remaja, cara penyelenggaraan koperasi, dan lain-lain.

## BAB III

### PROFIL 2 ORNOP PEREMPUAN DI INDONESIA

#### Pendahuluan

Jika harus disebut bahwa masa reformasi memiliki makna yang *significant* atas maraknya penguatan masyarakat madani, maka salah satunya adalah membiaknya aspirasi gerakan perempuan. Jika dimasa lalu (Orba) posisi perempuan telah puas diletakkan secara seragam sebagai pendamping suami, yang melembagakan "kebisuan kolektif"; maka kini, dekonstruksi atas tatanan lama itu telah menemukan momentnya. Subordinasi politik laki-laki yang mendapatkan legitimasi dari sistem patriaki, seolah berhenti sejenak oleh badai gerakan perempuan. Corak yang diperjuangkan bukan sekedar menuntut kesamaan hak, menguak seluruh tirai ketidakadilan struktural maupun kultural, yang hampir sepanjang sejarah Orde Baru terimbulk oleh mitos perempuan sebagai pendamping (Dharma Wanita), tetapi sekaligus ingin mendekonstruksi seluruh sistem nilai yang telah lama didominasi laki-laki. Berbagai organisasi yang melakukan advokasi atas kekerasan terhadap wanita telah tumbuh bagaikan cendawan pada musim hujan.

Rasanya sudah tidak terhitung lagi berapa jumlah LSM yang mengkhususkan diri sebagai pembela hak-hak perempuan, mulai dari tindakan kekerasan didalam keluarga sampai pada masalah "diskriminasi" perempuan disektor publik. Berapapun jumlahnya, rasanya yang agak khas dari gerakan yang pasca reformasi adalah bahwa tuntutan kesamaan itu sudah tidak lagi dalam bentuk "himbauan" reposisi, atau berbagai advokasi terhadap kekerasan perempuan, tetapi juga, pada tahap yang lebih sistematis dalam mengugat tatanan lama yang selama ini telah dimonopoli laki-laki. Di

kalangan tokoh-tokoh perempuan Islam, umpamanya, gerakan yang muncul sudah bukan lagi pada tataran atas perlunya pemaknaan kembali atas ayat-ayat Al-Qur'an yang telah "memihak" pada superioritas laki-laki, seperti masalah waris, poligami, dan sebagainya, tetapi juga, mendekonstruksi seluruh ayat-ayat "diskriminasi" itu, seperti dalam bentuk gerakan anti-poligami.

Radikalisasi pemaknaan sudah terjadi hampir di seluruh ruang apa saja yang dianggap merendahkan martabat perempuan. Bahkan corak penggugatan itu bukan hanya bergerak pada tuntutan kuantitas, seperti kuota 30 persen perempuan dalam anggota DPR, tetapi juga, pada hak-hal yang lebih substantif yang menuntut kesamaan jender secara lebih menyeluruh. Pokoknya sejauh menyangkut hak asasi dan relasi antara laki-laki dan perempuan yang berbau "diskriminasi" digugat dan dipersoalkan. Segala sesuatu yang dulu dianggap tabu dan serba disembunyikan, kini, diungkap secara terbuka. Seolah-olah seluruh ruang yang dulu dianggap sebagai wilayah "privat" sekarang ingin "dipublikasikan" sejauh hal itu menyangkut masalah kesamaan hak. Bentuk perjuangan itu bukan hanya pada penolakan poligami, tetapi juga, untuk mempublikasikan -- baik secara legal maupun *cultural* -- atas perkawinan sesama jenis, baik antara laki-laki gay, maupun sesama perempuan lesbian.

Agaknya tidak ada masalah yang tingkat kerumitan dan skalanya melebihi masalah perempuan. Cacat bawaan kodrati yang dimiliki telah lama disubordinasikan dalam berbagai bentuknya (agama, tradisi, budaya, dsb). Semua itu tak henti-hentinya mengundang simpatik atas kebutuhan pembelaan dari seluruh "ketidak berdayaannya". Ironisnya kekerasan perempuan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan sendiri. Hampir setiap hari kita disuguhi berita kisah sedih para TKW yang bunuh diri karena tak tahan di siksa majikannya (baca: perempuan), diperkosa, diperlakukan secara tidak manusia, digaji secara diskriminatif dan sebagainya. Semuanya itu hanya menunjukkan ada kebutuhan yang

permanent untuk memperjuangkan hak-hak perempuan karena posisinya yang tidak menguntungkan telah menjadi sasaran kekerasan.

Dari seluruh “pembebasan” perempuan yang secara terus-menerus diperjuangkan, baik oleh kaum perempuan sendiri maupun oleh kaum laki-laki pembela kesamaan hak adalah masalah kekerasan. Kekerasan dalam arti yang luas, seringkali didefinisikan dalam berbagai dimensi: kekerasan ekonomi (eksploitasi), kekerasan fisik (pelecehan seksual), kekerasan psikologis (pelecehan batin), dan kekerasan sosial (diskriminasi gender). Para gerakan perempuan di Indonesia sudah tidak lagi menggugat keterbelengguan itu di tingkat wacana, atau hanya berkeluh kesah melalui surat-menyurat seperti dilakukan Kartini dimasa lalu, tetapi bagaimana harus mengubah seluruh ketidakadilan itu dalam bentuk aksi.

Salah satu yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah gerakan perempuan melalui LSM yang mengkhususkan diri pada advokasi atau pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh kaum perempuan sendiri. Tulisan pendek ini mencoba menggambarkan dinamika LSM perempuan di Yogyakarta. Sebagai kota pelajar yang cenderung memiliki ruang dan waktu lebih banyak untuk melakukan refleksi atas gejala sosial apa saja, tidak mengherankan jika di kota ini telah melahirkan LSM perempuan tertua di Indonesia.

Sementara itu, tidak diketahui secara pasti berapa banyak sebenarnya jumlah NGO yang ada di kota pelajar ini, meskipun yang menaruh perhatian terhadap masalah perempuan oleh perempuan, ternyata cukup banyak. Sebutnya saja, misalnya, Rifka Annisa Women’s Crisis Center (RAWWC), Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), dan RUMPUN Tjoet Njak Dien. Agaknya masing-masing NGO perempuan ini telah menaruh perhatian secara lebih khusus atas persoalan perempuan yang paling dianggap semi-permanen. Misalnya, Yasanti lebih memfokuskan diri pada pendampingan buruh

endong-endong di Pasar Bringharjo dan buruh perempuan di Parakan; LSPPA lebih memfokuskan pada pengembangan perempuan dan anak; RAWWC menaruh perhatian pada kekerasan perempuan (dalam keluarga), dan Tjoet Njak Dien, pada PRT (bekerja Rumah Tangga).

### **1. Jalan Panjang Merajut Kemitraan; Rifka Annisa dalam Pengalaman, Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan di Yogyakarta**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu penting dalam wacana perempuan, mengingat kekerasan terhadap perempuan merupakan akibat yang paling nyata dari sistem sosial budaya yang memosisikan perempuan serba tidak beruntung. Berdasarkan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekerasan perempuan mencakup kekerasan yang bersifat fisik, psikis, dan seksual termasuk juga akan tindakan ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan sewenang-wenang baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun privat. Wilayah privat yang selama ini dianggap sebagai wilayah yang aman bagi perempuan ternyata justru merupakan tempat operasi terhadap perempuan yang “dilegalkan” oleh masyarakat. Hal ini sangat terkait dengan nilai yang berkembang dalam masyarakat akan status perempuan di dalam rumah tangga. Isteri memiliki kewajiban taat tanpa *reserve* kepada suami, karenanya bila isteri mengabaikan kewajiban ini, suami yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin dibenarkan melakukan kekerasan (secara fisik sekalipun) dalam kerangka mendidik isteri. Lebih dari itu, wilayah privat merupakan wilayah yang tak tersentuh oleh hukum.

Atas dasar keprihatinan akan nasib perempuan yang diuntungkan oleh sistem sosial tersebut Rifka Annisa *Women's Crisis Centre* Yogyakarta berdiri. Pusat krisis perempuan pertama di Indonesia tanggal 23 Agustus 1993. Kata Rifka Annisa berasal dari bahasa Arab yang artinya teman perempuan. Sesuai dengan

namanya Rifka Annisa bermaksud untuk menjadi teman perempuan-perempuan yang sedang dirundung malang. Pada awal kegiatannya Rifka Annisa berfungsi sebagai pusat krisis yang langsung memberi layanan langsung kepada perempuan korban kekerasan. Hal itu dilakukan sambil mencari format pendampingan yang sesuai dengan situasi perempuan di Indonesia khususnya di Yogyakarta. Proses pencarian ini dikarenakan belum ada lembaga yang dapat dijadikan sebagai acuan bagaimana menjalankan sebuah lembaga yang memberikan layanan langsung terhadap korban kekerasan.

Lahirnya Rifka Annisa dimotori oleh Sri Koesyoeniarti<sup>1</sup>, seorang aktivis perempuan yang bekerja pada isu buruh juga pendiri Yasanti (ORNOP perempuan pertama di Indonesia). Koes gelisah ketika menyaksikan maraknya kekerasan yang menimpa buruh perempuan yang diorganisirnya. Kegelisahan itu berlipat ketika Koes menyaksikan realita yang terjadi disekelilingnya. Di tengah kampung Pugeran Yogyakarta ini hampir setiap hari terjadi kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan miskin, seorang isteri tukang becak dipukuli suaminya, besoknya tukang cuci telah dikabarkan telah mati oleh suaminya di Jakarta karena sang suami ingin kawin lagi dan beberapa kejadian memilukan yang menimpa perempuan dihari-hari berikutnya. Namun disadari olehnya bahwa LSM tempatnya bernaung tidak mungkin menangani kasus-kasus yang menimpa perempuan ini, karena keterbatasan sumber daya yang dimilikinya dan beban pengorganisasian buruh perempuan yang sangat menyita waktu. Namun gagasan untuk melakukan sesuatu terhadap masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan ini terus bergulir di lingkungan Koes dan kawan-kawannya. Hingga suatu saat di tahun 1989 mereka mendapatkan undangan dari Bangkok Thailand untuk menghadiri workshop tentang *Women Crisis Center*. Workshop itu

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Sri Koesyoeniarti pada tanggal 1 Agustus 2003, yang dikutip bebas dari Laporan Refleksi 10 tahun Perjalanan Rifka Annisa

sendiri sangat berarti bagi Koes dan kawan-kawan, karena untuk pertama kalinya mereka mendapatkan pengetahuan yang cukup mendalam tentang tata cara pendirian, system, dan pengelolaan WCC. Koes dan kawan-kawan mulai mengkaji secara mendalam dokumen-dokumen dan makalah-makalah yang dibawa dari Bangkok dan mencoba menjajagi kemungkinan untuk dilakukan di Indonesia. Koes kemudian menjalin kontak dengan seorang *organizer* WCC di Australia yang semakin memperjelas bentuk WCC dikepalanya. Koes disarankan untuk melihat langsung apa yang telah dilakukan di Malaysia. Koes bersama 2 orang temannya kemudian berangkat ke Malaysia, dan semakin kuatlah keinginan untuk mendirikan pusat penanganan krisis perempuan korban kekerasan di Indonesia.

Sepulang dari Malaysia Koes menawarkan gagasan tersebut kepada FDPY (Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta). Selama 2 tahun gagasan ini didiskusikan secara intensif di FDPY, dan sempat beberapa kali terbentuk komite untuk melakukan aksi-aksi *ad hoc* merespon kekerasan terhadap perempuan yang muncul ke permukaan. Namun cita-cita Koes untuk mewujudkannya secara institusional tidak kunjung terwujud juga. Koes kemudian mencoba mengajak beberapa orang yang dianggap lebih matang (secara usia) untuk memulainya. Koes kemudian mengontak Rahayu Mochtar atau biasa dipanggil Yayuk (seorang ibu rumah tangga) dan Desti Murdjana, aktivis perempuan yang peduli pada isu-isu hak perempuan dan reproduksi. Yayuk sendiri telah tinggal cukup lama di Amerika sehingga gagasan Koes bukan hal yang asing lagi baginya. Sedangkan Desti telah lama bergelut dengan masalah-masalah perempuan di PKBI. Mereka bertiga kemudian sepakat untuk merealisasikan gagasan tersebut dan mengajak beberapa orang lagi sesuai kebutuhan penyiapan. Sitoroesmi Prabuningrat seorang perempuan pengusaha juga pada waktu itu adalah seorang *public figure* diajak untuk berperan sebagai pencari dana serta menggalang dukungan pihak yang lebih luas, dan Latifah Iskandar perempuan pengusaha busana muslim "Flora" yang diminta berperan sebagai

bendahara. Untuk memulai aktivitasnya, kelompok ini memerlukan sebuah sekretariat yang pasti, maka mereka kemudian mengontak Musrini Darussalam seorang ibu yang sejak awal telah aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan dengan senang hati menyediakan rumahnya sebagai sekretariat. Pada tanggal 10 Nopember 1992, berlima mereka kemudian berangkat ke Notaris untuk meresmikan institusi yang kemudian bernama Yayasan Sakina, dan mencantumkan Rifka Annisa sebagai institusi pelaksana mandat yayasan.

Untuk lebih memberi gambaran isu tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dilakukanlah diskusi-diskusi dengan mengundang maupun mendatangi orang-orang yang dinilai *concern* dan memiliki pengalaman ikut serta memecahkan masalah-masalah KTP. Leila Ch. Budiman adalah orang pertama yang diundang karena Leila dianggap sebagai orang yang sangat intens menjadi konselor KTP di harian KOMPAS. Diskusi juga dilakukan dengan Hasan Basri, Jamaluddin Antjok psikolog UGM yang sedang populer pada saat itu. Mereka juga memperkuat pengetahuan, keyakinan, dan gagasannya dengan melakukan studi banding ke WCC di Manila dan Washington.

Setahun kemudian Rifka Annisa *Women Crisis Centre* resmi dideklarasikan, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1993. Pada awalnya Rifka membuka konseling 2 jam seminggu, dan beberapa waktu kemudian ditingkatkan menjadi 4 jam perminggu sampai 1 hari seminggu karena klien yang datang semakin bertambah dan membutuhkan intensitas lebih. Dana pertama dikumpulkan dari pribadi-pribadi anggota Yayasan dan mereka berusaha mencari donor kecil-kecilan. Oxfam GB kemudian tertarik dengan gagasan tersebut. Dan bersedia mendanai meskipun tidak besar. Selain karena isu tersebut masih belum populer di Indonesia, gosip yang beredar di luar, Rifka Annisa adalah kumpulan Dharma Wanita yang tidak progresif. Dua hal ini menjadikan Rifka Annisa cukup kesulitan mendapatkan dana meski kecil-kecilan. Mereka kemudian bertemu

dengan Bianti Djiwandono pejabat *Ford Foundation* (FF), yang pada awalnya juga meragukan keseriusan Rifka Annisa. Namun akhirnya ia berhasil diyakinkan dan pada tahap awalnya FF bersedia membiayai perjalanan beberapa Rifka Annisa ke WCC di Malaysia serta mendanai pembentukan Rifka Annisa WCC<sup>2</sup>.

Dalam proses pencarian yang panjang itu tak jarang Rifka Annisa mendapat cemoahan dan cibiran bernada meragukan, termasuk dari kalangan aktivis perempuan sendiri, akan kemampuan Rifka Annisa untuk mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Memasuki tahun ke dua (1995), Rifka Annisa mendapat kesempatan untuk studi banding ke beberapa *Crisis Center* di tiga negara ASEAN. Kunjungan ini jelas memiliki arti tersendiri bagi perjalanan Rifka Annisa karena sejak saat itu tergambar dengan jelas bagaimana seharusnya pusat krisis untuk perempuan itu dijalankan. Pada tahun itu pula Rifka Annisa telah dapat merumuskan visi misi, tujuan, isu strategis yang akan dijadikan pijakan dalam menjalankan roda organisasi.

Visi dan misi sebagai falsafah dasar perjuangan Rifka Annisa WCC waktu itu terumuskan sebagai berikut:

“Sesungguhnya perempuan dan laki-laki sama kedudukannya di hadapan Allah, sehingga perempuan harus dibebaskan dari budaya dan tindak kekerasan”.

Sedangkan tujuan Rifka Annisa meliputi, Pertama, pemberdayaan perempuan. Kedua, sosialisasi perspektif sadar gender dan isu kekerasan terhadap perempuan. Ketiga, advokasi masalah-masalah perempuan.

Terumuskannya aspek-aspek dasar organisasi, membuat Rifka Annisa menemukan format gerakan yang semakin jelas. Pada tahun

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Sri Koesyoeniarti, pada tanggal 1 Agustus 2003 dengan Rifka Annisa.

1994, Rifka Annisa telah menangani 18 kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun berikutnya, 82 kasus kekerasan dan tampaknya dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dari peningkatan jumlah kekerasan terutama di wilayah domestik (pada tahun 2002 terdapat 247 kasus penganiayaan suami kepada isteri, dan 97 kasus penganiayaan dalam masa pacaran) inilah menjadikan persoalan penghapusan kekerasan kepada perempuan dianggap penting dan diperlukan sebuah program dan kerjasama yang serius untuk menangani isu tersebut. Salah satu strategi utama yang dikembangkan adalah dengan penciptaan dan penguatan terhadap perempuan korban kekerasan dalam bentuk pendidikan dan pengorganisasian, serta penciptaan institusi pendukung bagi berkembangnya para korban sebagai pelaku utama persoalan dirinya maupun perempuan lain dilingkungannya.

Apabila diandaikan kondisi “dunia tanpa kekerasan terhadap perempuan” adalah tujuan akhir dari perjalanan Rifka Annisa, maka ada beberapa terminal atau fase yang harus dilalui sebelum sampai pada tujuan akhir yang diimpikan. Dalam konteks Rifka Annisa, fase-fase yang telah dan harus dilalui adalah sebagai berikut:

Fase pertama, yakni fase emergensi, dimana Rifka Annisa melakukan pertolongan segera untuk menangani langsung perempuan-perempuan korban kekerasan. Pada fase ini pertamanya yang dibutuhkan adalah perlindungan bagi korban dan membantu memecahkan persoalan secara personal. Berangkat dari keprihatinan terhadap buruknya kondisi perempuan korban kekerasan, melahirkan bentuk pelayanan dan pendampingan perempuan korban kekerasan sebagai strategi mencapai terminal pertama. Strategi itu terealisasi dalam bentuk pendirian *shelter*, konseling psikologis, dan bekerjasama dengan paramedis dalam rangka memberikan rasa aman, menumbuhkan *self confident*, *self esteem*, pemulihan penderitaan fisik dan keberanian untuk

memutuskan penyelesaian terbaik bagi diri sendiri sesuai dengan kondisinya.

Fase kedua, yakni fase pemberdayaan korban, di mana Rifka Annisa mulai memperkuat para korban untuk mampu mengambil langkah-langkah penyelesaian persoalannya. Ini terealisasi dalam bentuk pendampingan hukum, memfasilitasi *support* grup, bekerjasama dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya (RPK), serta bermitra dengan rumah sakit untuk memperoleh visum (UPP). Fase ini juga merupakan media belajar bagi korban untuk mampu memahami hak-haknya, membangun solidaritas dan menginternalisir strategi, dan taktik memecahkan persoalannya.

Fase ketiga, adalah fase pengorganisasian dan advokasi. Pada fase ini terjadi perubahan dimana Rifka Annisa memasuki kerja-kerja pengorganisasian perempuan korban. Pada saat itulah program diarahkan dalam rangka memperkuat upaya menggeser kekerasan perempuan dari wilayah privat ditransformasikan kewilayah publik sebagai upaya strategis kearah gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Ini terealisasi dalam bentuk pembangunan dan penguatan *Community Based Crisis Centre* yang menjadi wadah perjuangan hak-hak politik, ekonomi, dan budaya perempuan. Pada fase ini Rifka Annisa memasuki paradigma yang kritis dalam kegiatannya, karena mereka menyentuh wilayah struktural dengan memasukkan analisis hak dan kelas kedalam persoalan-persoalan perempuan. Bersamaan dengan itu RAWWC mulai terlibat dalam kerja-kerja advokasi isu-isu perempuan ditingkat lokal misalnya dalam perumusan anggaran daerah berperspektif gender, serta terlibat dalam aliansi advokasi nasional dalam rangka mendorong lahirnya kebijakan tentang eliminasi kekerasan dalam rumah tangga. Rifka Annisa juga mengembangkan studi kebijakan untuk mendukung kerja-kerja mempengaruhi kebijakan yang memihak perempuan.

Pilihan mengorganisir perempuan korban kekerasan sejak semula disadari bukanlah pekerjaan mudah hal ini disampaikan oleh

Direktur Eksekutif Rifka Annisa, Tyas, Ada prasyarat dan proses yang harus dilalui termasuk menyiapkan sarana dan sistem pendukung sehingga memungkinkan setiap tahap dilalui dengan baik. Mengorganisir perempuan korban kekerasan bukanlah suatu pekerjaan dimana seseorang harus memenuhi ketentuan 8 jam kerja sehari karena takut mendapat kondisi jelek dari atasannya, Mengorganisir perempuan korban kekerasan memang suatu pilihan yang jelas dan tegas untuk berpihak kepada korban. Bukan pilihan yang samar, karena ketika Rifka Annisa memilih pengorganisasian perempuan korban kekerasan maka posisi yang dipilih tidak netral, namun sarat dengan pilihan-pilihan nilai, serta kaidah-kaidah yang harus dipegang teguh. Dalam proses perjalanannya tentu saja tidak semulus yang dibayangkan untuk mencapainya, ada kontradiksi-kontradiksi yang tidak hanya ditemukan diluar, namun justru berasal dari dalam diri Rifka Annisa sendiri.

Ada dua peran yang sekaligus diemban Rifka Annisa yakni peran melayani dan mengorganisir yang jika tidak hati-hati akan menyebabkan kontradiksi. Karena disatu sisi pelayanan seringkali menyebabkan ketergantungan korban terhadap RAWCC dan disisi lain pengorganisasian berupaya mendorong sikap kritis, solidaritas, dan kemandirian korban. Hal ini secara eksplisit dikemukakan oleh beberapa orang staf Rifka Annisa, ketika merasa konseling atau *recovery* yang selama ini dilakukan terasa hanya cukup menyelesaikan masalah individual, belum menuju pada penyelesaian yang lebih *struktural*.

### **Memasuki ke Arah Gerakan**

Menyangkut upaya pembangunan gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, maka Rifka Annisa sudah saatnya menetapkan *route strategi* pengorganisasian yang kontekstual dengan misinya yang berperspektif korban dan konstruksi sosial ketidakadilan gender serta HAM.

Menurut hasil refleksi 10 tahun perjalanan Rifka Annisa di wilayah pemberdayaan perempuan korban kekerasan ada beberapa prasyarat membangun gerakan yang perlu diberi perhatian lebih antara lain:

- (1) Paradigma *self determination* sebagai cara pandang pertama.
- (2) Metodologi pelibatan klien dan pengorganisasian pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam membangun gerakan.
- (3) Penguasaan teknik dan strategi pendidikan dan pengorganisasian bagi personil yang berada di *groundwork* dan *Front line*.
- (4) Pengkayaan media-media pendidikan dan pengorganisasian bagi petugas *groundwork* dan *Front line*.
- (5) *Supporting system* yang menunjang strategi.

Pada konteks sebagai gerakan, Rifka Annisa mengambil pengetahuan dari teori-teori feminisme untuk mengambil perspektif yang lebih kaya dalam memahami persoalan penindasan terhadap perempuan. Menurut mereka, teori feminisme itu membantu untuk mengerti dan memahami persoalan dan oleh karena itu kedudukannya adalah sebagai metodologi dan bukan *ideologi*. Hal tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa tidak ada teori yang sempurna, semakin banyak perspektif yang diambil, semakin kaya akan pemahaman dan semakin bijak dalam bertindak. Perdebatan untuk meletakkan *ideologi feminis* dalam perjuangan mereka cukup menarik. Nama Rifka Annisa yang menyandang nama Islami itu menjadi tawaran untuk mempertanyakan apakah label keagamaan perlu dilekatkan disana. Menurut sebagian dari mereka, Islam memang sebagai motivator penggerak, karena Islam menuntut peduli dengan persoalan dunia kendati pun memang sangat ideologis. Namun mereka menggaris bawahi tetap menggunakan teori feminisme untuk memahami fakta kekerasan terhadap perempuan. Bukti bahwa mereka mengambil semua perspektif feminisme adalah isu yang mereka bawa, misalnya aborsi. Dalam isu tersebut mereka

memilih sikap tengah-tengah antara *pro-choice* dan *pro-life*. Isu aborsi sendiri merupakan isu yang dibawa oleh feminisme radikal. Sementara mereka memilih kesadaran dan pemberdayaan perempuan yang merupakan isu utama feminisme liberal. Dan mereka bergerak untuk kesetaraan gender adalah isu yang dikembangkan oleh feminisme marxis dan sosialis.

## **2. Potret Pembebasan Kelompok Marginal: Kasus Rumpun Tjoet Njak Dien di Yogyakarta**

Seperti umumnya sebuah LSM yang lahir di Yogyakarta, RUMPUN (Yayasan) Tjoet Njak Dien lahir dari pergumulan Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta (FDPY) yang terbentuk pada tahun 1989. Forum ini mula-mula merupakan paguyuban para aktifis perempuan dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta, yang menaruh perhatian pada penghargaan dan pelaksanaan HAM dengan menaruh spesialisasi pada kesetaraan gender berdasarkan Deklarasi Universal HAM dan CEDAW. Dalam perjalanannya aktivis yang aktif dalam FDPY tidak hanya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga, dari kalangan ibu rumah tangga, pekerja seks, pekerja pabrik, pekerja rumah tangga, serta pekerja perempuan sektor formal lainnya.<sup>3</sup>

Dari kelompok diskusi yang multi-kampus dan berbagai profesi perempuan dengan perbedaan latar belakang primordial (ras, suku, agama) ini akhirnya semakin menyadari bahwa penyelesaian masalah perempuan; ternyata tidak dapat terselesaikan hanya di meja diskusi atau seminar. Semuanya membutuhkan tindakan konkrit untuk mengubah bagaimana ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan itu terselesaikan. Keinginan untuk melakukan tindakan advokasi semakin terasa, mengingat kekerasan demi kekerasan selalu dilihat tanpa bisa berbuat banyak untuk mengubahnya. Tiadanya

---

<sup>3</sup> Profil Rumpun (Yayasan) Tjoet Njak Dien Yogyakarta, tanpa tahun.

lembaga atau organisasi yang mampu mewartakan seluruh problem, dianggap sebagai salah satu penyebabnya. Kebutuhan akan wadah yang terlembaga semakin tidak bisa ditunda. Akhirnya rasa empati dan keprihatinan itu semakin mengerucut -- mengingat kasus perempuan terlalu banyak -- dan dipilihlah upaya "pemberdayaan" perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai agenda utamanya.

Pada tahun 1991 FDPY berganti nama menjadi RUMPUN (Forum Perempuan Tjoet Njak Dien). Sedangkan pilihan nama pahlawan wanita Aceh itu sendiri, konon, lebih didasarkan pada keberanian sikap perlawanan pada penindasan yang dilakukan. Mengingat terlalu luasnya scope permasalahan yang ada, pada akhirnya ruang advokasi yang dilakukan RUMPUN mengalami pengerucutan yaitu pekerja perempuan. Khususnya Pekerja Rumah Tangga (PRT). Beberapa kegiatan yang pernah dilakukan RUMPUN yaitu advokasi non-litigasi dan pemberdayaan pekerja perempuan antara lain: advokasi buruh gendong di Pasar Bringhamjo atas kebijakan Pemda -- pada waktu itu -- dalam pengaturan tempat dagang yang dianggap sepihak. Dalam perjalanannya karena RUMPUN berbentuk forum yang sifatnya terbuka, sering mengalami kendala dalam manajemen organisasinya, RUMPUN berubah bentuk menjadi Yayasan dengan tetap menggunakan nama Tjoet Njak Dien atau yayasan Tjoet Njak Dien.<sup>4</sup>

Namun dalam perjalanannya, terutama ketika merefleksikan kembali dari bentuk dan organisasi yang diciptakan, seluruh dewan pendiri, dewan pengurus, dan anggota yayasan sepakat untuk mengubah bentuk organisasi menjadi organisasi berbasis keanggotaan, dalam bentuk perkumpulan. Berubahnya menjadi perkumpulan itu ditetapkan dalam musyawarah Besar Luar Biasa Anggota Yayasan Tjoet Njak Dien pada tanggal 27-28 Juli 2001, dengan nama RUMPUN, yang terdiri dari dua lembaga operasional,

---

<sup>4</sup> Ibid., hal.2.

Yaitu Rumpun Tjoet Njak Dien (di Yogyakarta) dan Rumpun Gema Perempuan (di Jakarta), yang disyahkan pada Kongres I RUMPUN tanggal 21-24 April 2002.<sup>5</sup>

Bagi RUMPUN Yogyakarta ini, sekali lagi, akhirnya menetapkan Pekerja Rumah tangga (PRT) menjadi fokus utamanya. Setidaknya ada tiga alasan mengapa pilihan itu jatuh pada PRT. *Pertama*, PRT adalah sebuah profesi yang nyaris tidak terlalu banyak diperhatikan publik. Sementara sebagai sebuah entitas yang sangat membutuhkan perlindungan. Stigma yang melekat pada profesi ini adalah: tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang subsisten, minimnya pengetahuan tentang hukum dan HAM, dan secara sosial dianggap masyarakat yang tidak berkelas. Sedangkan secara budaya ter subordinasi oleh budaya patriarki dan terkungkung oleh feodalisme yang kuat. Seluruh kekurangan yang dibawa sejak lahir ini telah membuat mereka bukan saja sangat rentan terhadap kekerasan dengan segala variasinya, tetapi juga, cenderung tak tertengok oleh siapapun atas kebutuhan pembelaan terhadap hak-haknya yang paling dasar sebagai manusia.

*Kedua*, sebagai sebuah profesi dengan segala stigma yang melekatnya yang hampir tidak memiliki keahlian khusus ini, membuat mereka sangat lemah dalam tawar-menawar dengan pasar kerja. Standar gajinya hampir tidak pernah ada, jam jadwal kerjanya tidak pernah diperhitungkan, masa istirahatnya tidak pernah dipikirkan dan yang lebih penting, mereka seringkali sebagai sasaran kekerasan yang hampir tak bertepi. Singkatnya dampak dari minimnya keahlian khusus dan pengetahuan yang terbatas, serta lemahnya pertahanan yang dimiliki membuat mereka tanpa status dan masa depan.

*Ketiga*, sebagai sebuah profesi mereka cenderung "diremehkan". Padahal mereka sangat dibutuhkan. Akibatnya mereka menjadi sangat rentan terhadap kekerasan -- baik kekerasan

---

<sup>5</sup> Ibid., hal.3.

ekonomi, psikis, fisik, maupun sosial -- yang membuat mereka tidak pernah mampu membela dirinya sendiri ketika terjadi pelanggaran hak-haknya. Baik yang dilakukan oleh pengguna jasa (PJ) atau oleh pihak lain, termasuk suaminya sendiri.

Atas dasar tiga realitas diatas inilah upaya agaknya yang mendorong kelompok Rumpun Tjoet Njak Dien mencoba untuk melakukan tiga kegiatan sentral. *Pertama*, melakukan pemberdayaan dengan meningkatkan kemampuan atau keahlian teknis agar mereka memiliki "*bargaining position*" yang memadai dan sejajar dengan para pekerja profesi lainnya pekerja buruh, misalnya. *Kedua*, melakukan proses *character building*, dengan menstimulasi kesadaran kritis sebagai basis untuk memahami hak-haknya dan sekaligus sebagai senjata untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri, ketika kekerasan itu menimpanya. *Ketiga*, melakukan advokasi terhadap segala pelanggaran hak-hak kelompok PRT ini yang kemudian digolongkan atas kekerasan: ekonomi, fisik, psikologis, dan sosial.

Dalam rangka meletakkan derajat yang sepadan atas profesi lain yang sekelas atau mendekonstruksi ideologi subordinatif atas kelompok PRT, RUMPUN juga telah melakukan perubahan terminologi PRT, yang tidak hanya berkonotasi semiotik atau sekedar *eufisme* (penghalusan kata) atas huruf "P" pada PRT. Selama ini kata "P" dalam PRT selalu dibunyikan sebagai "pembantu". Kata "pembantu" ternyata tidak netral dari ideologi subordinasi yang mengandung pengertian, sebagai bagian dari keluarga yang privat sifatnya. Konotasi privat atau bagian dari keluarga, dalam kenyataannya bukanlah dalam arti positif yang serba diperlakukan sama sebagai bagian dari sebuah keluarga, tetapi lebih, pada konotasi yang negatif. Tidak dihitung jasanya, tidak diperhatikan hak istirahatnya dan yang lebih penting memberi ruang atas segala "kekerasan" yang dianggap wilayah internal (baca: keluarga). Sehingga, perlindungan yang dipublikkan atas entitas ini, seolah-olah

menjadi “melanggar” sesuatu yang telah lama di privatkan secara negatif. Dengan demikian seluruh seluk-beluk yang berkaitan dengan pembantu rumah tangga, seolah menjadi bagian dari keluarga itu sendiri yang tidak punya ruang untuk dipublikasikan. Dengan demikian konotasi perubahan kata “pembantu” menjadi “buruh” memiliki makna secara terbatas sebagai “pembebasan”. Paling tidak atas perlunya perlindungan atas kemungkinan terjadinya kekerasan ekonomi (tidak dibayar): kekerasan fisik (disiksa): kekerasan psikologis (dilecehkan), dan kekerasan sosial (dianggap sebagai masyarakat tanpa status) lebih dimungkinkan untuk dijaga. Dengan sistem kontrak tertulis yang merupakan kesepakatan secara seimbang antara pengguna jasa (PJ) dan Pekerja Rumah Tangga (PRT) diharapkan akan menghindari “eksploitasi” atas sebuah profesi yang selama ini dianggap sebagai *non-job*.

Dengan penetapan gaji yang jelas, jam istirahat yang teragenda, penentuan volume kerja, hak cuti berkala, dan sebagainya yang dimasa lalu tertimbun pada ruang “*peseduluran*” (“kekeluargaan”) yang cenderung dibawah mekanisme yang eksploitatif, kini telah diupayakan untuk diletakkan sebagaimana mestinya. Singkatnya digantinya kata “pembantu” menjadi “pekerja”, harapannya adalah akan terbebaskannya seluruh eksploitasi terselubung akan berubah menjadi sebuah profesi yang dihargai, dipandang sebagai pekerja yang profesional.

Dalam upaya merealisasikan perubahan ideologi kata itu menjadi sebuah realitas yang sebenarnya, RUMPUN telah menerapkan sistem kontrak terhadap para pengguna jasa yang dulu disebut “majikan” atas para PRT yang pernah menjadi pembantunya. Di tengah-tengah *stereotype* masyarakat Yogyakarta yang terkenal masyarakat “*priyayi*” (baca: feodal), tentu saja perubahan orientasi itu sangat fenomenal. Diluar banyaknya penolakan yang dilapisi oleh pikiran lama bahwa PRT adalah *hanya* seorang “pembantu” yang telah lama dianggap sebagai kelompok yang tidak boleh “menuntut”, “*rewel*” termasuk

atas hak-haknya sendiri, membuat perubahan kata itu sifatnya menjadi perubahan paradigmatis. Dalam kenyataannya, perubahan-perubahan yang disetujui dalam tingkat wacana, seperti prinsip-prinsip kesetaraan, penghargaan, dan sebagainya, seringkali hanya berhenti dalam diskursus saja. Di tingkat praktek terlalu banyak yang mengingkarinya. Agak ironis memang, jika ternyata konon, yang menolak adanya perubahan paradigma itu dalam bentuk kontrak kerja, sebagian justru kelompok terdidik seperti dosen, jaksa, pejabat publik, yang secara teoritik sebagai kelompok yang seharusnya paling menghargai hak orang lain. Neo-feodalisme dalam konotasi ini agaknya, bukan monopoli kaum “priyayi” lama, tetapi juga para “priyayi baru”, yang telah lama menikmati perbedaan strata itu.

### **Program Pembebasan**

Salah satu agenda yang selalu dikemukakan oleh RUMPUN bahwa program yang ingin dicapai adalah program pembebasan. Stigma bahwa pekerja rumah tangga yang marginal dan dimarginalkan yang membutuhkan “pemberdayaan” merupakan ideologi yang menjadi landasan gerakan RUMPUN ini. Kebutuhan untuk meningkatkan martabat PRT sebagai sebuah profesi yang dihargai dan bermartabat, nampaknya bukan hanya harus dimulai dari sekedar membantu mereka pada peningkatan ketrampilan, tetapi juga, pada usaha untuk mengembalikan hak-haknya sebagai manusia yang memiliki hak untuk dihargai. Dan yang lebih penting adalah membangkitkan kesadaran pada para pemilikinya bahwa kesadaran itu adalah bagian yang harus dimiliki. Dalam kenyataannya, stigma yang begitu lama melekat pada PRT sebagai pembantu rumah tangga yang dikonotasikan dengan segala predikat yang cenderung negatif secara sosial, ternyata tidak terlalu mudah untuk diangkat tanpa mengangkat profesi mereka agar diperhitungkan; baik sosial (status) maupun dari segi ekonomi (tingkat pendapatan). Dua fungsi ini yang ingin diangkat secara bersama-sama oleh RUMPUN.

Paling tidak ada tiga program yang selama ini ditangani RUMPUN. *Pertama*, mendirikan sekolah alternatif. *Kedua*, penguatan organisasi. *Ketiga*, advokasi dan pelayanan atas kekerasan terhadap PRT. Dalam upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kesadaran kritis PRT, sejak bulan Mei tahun 2003, RUMPUN bekerjasama dengan *Ford Foundation* telah membuka sekolah keterampilan PRT “gratis” di Umbul Harjo Yogyakarta. Sekolah yang disebut pendidikan alternatif itu intinya mempersiapkan PRT bukan saja terampil (*professional*) dalam bidangnya, tetapi juga, memiliki sikap kritis sekaligus memiliki kemampuan untuk mengadvokasi diri sendiri. Sebagai satu-satunya sekolah PRT yang ada di Indonesia, sekolah ini dianggap sebagai terobosan baru atas upaya untuk memecahkan masalah rendahnya “*bargaining position*” kelompok marjinal ini dalam pasar kerja. Meskipun sekolah ini relative baru yang berjalan dalam tiga angkatan, masing-masing angkatan pertama berjumlah 80 orang, angkatan kedua 45 orang, dan angkatan ketiga sekitar 30 orang, dalam banyak hal telah memiliki keberhasilan yang menakjubkan. Tak satu pun para alumninya yang bekerja tanpa kontrak tertulis. Perjuangannya dalam merubah “pembantu” menjadi “pekerja” secara pasti telah membawa manfaat bagi para alumninya.

Pendidikan yang memakan waktu sekitar 3-4 bulan itu telah dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar. Empat jurusan yang dipilih masing-masing: Jurusan tata boga, jurusan *baby sitter*, jurusan pengasuh orang manula, dan pemberian materi tambahan keterampilan sebagai operator komputer, stir mobil, dan penguasaan bahasa Inggris sehari-hari, telah memiliki nilai tambah bagi para siswanya. Semuanya telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan berkembangnya permintaan publik, khususnya dalam kelas menengah keatas. Untuk menunjang semua permintaan pasar itu RUMPUN telah merancang pratikum tata boga secara memadai. Dalam peningkatan keterampilan tata boga, misalnya, telah diajarkan menggunakan alat-alat “moderen” seperti mesin cuci, kulkas, kompor gas/elektronik, dan sebagainya. Sedangkan pelajaran tambahan sebagai upaya untuk

menaikkan nilai “tawar-menawar” dengan pasar pelajaran menyetir mobil, mengoperasikan komputer dan bahasa Inggris percakapan sehari-hari, diberikan secara cuma-cuma. Sementara itu dalam rangka penguatan kesadaran kritis atas perlunya membela hak-haknya, telah diberikan berbagai materi berperspektif jender, disekitar masalah reproduksi, penguasaan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan diri, dan pengenalan pasal-pasal HAM yang krusial. Modul dan/atau kurikulum yang ada selalu dievaluasi dan disesuaikan perkembangan. Seluruh pelajaran diberikan layaknya anak sekolah yang setiap minggunya rata-rata tiga sampai lima hari. Untuk memudahkan komunikasi dan juga meminimkan biaya, RUMPUN juga menyediakan asrama. Semuanya gratis. Untuk menjaga mutu dan profesionalitas, seluruh dosennya diambil dari perguruan tinggi di Yogyakarta.

Untuk mempermudah prosedur masuk sekolah alternatif serta memperluas jangkauan akses yang dimiliki oleh kelompok marjinal itu, RUMPUN telah menetapkan persyaratan itu sesederhana mungkin. Siapa saja boleh masuk tanpa dipungut uang sesen pun, asal mereka berumur 15 tahun, berasal dari keluarga miskin dan berminat menjadi PRT. Meskipun promosi sekolah alternatif ini sudah disosialisasikan lewat pengumuman di desa-desa, radio-radio, atau media massa lainnya, ternyata tawaran sekolah gratis itu justru membuat para orang tua cenderung “ketakutan”. Di tengah-tengah dunia yang serba membayar dan banyaknya kabar tentang jual-beli wanita muda untuk dijadikan wanita penghibur, isu gratis yang ditawarkan RUMPUN dalam kadar terbatas telah menjadi bumerang. Pada umumnya para orang tua baru merelakan anaknya masuk di sekolah ini, setelah melihat sendiri para tetangganya atau saudaranya menjadi alumni dengan segala keterampilan yang dimiliki dan masa depan yang lebih baik.

Melihat bahwa para tamatan sekolah ini telah membuktikan bukan saja tidak ada yang menganggur, tetapi juga, memiliki tingkat

gaji yang lebih tinggi dan dilindungi oleh RUMPUN, maka umumnya para calon PRT yang masuk di sekolah alternatif itu adalah yang sudah benar-benar mengetahui tujuan dan tanggung jawab yang telah dimainkan. Dan salah satu peran baru yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun menjadi bagian yang tak terpisahkan, yang sebenarnya merupakan konsekuensi dari pendidikan yang didirikan adalah, sebagai semacam “penyalur” bagi para alumninya untuk mendapatkan kerja yang layak.

Meskipun lembaga ini tidak dimaksudkan untuk memerankan diri sebagai “penyalur” dalam konotasi yang paling lazim untuk meminta uang jasa atas PRT yang disalurkan, namun secara moral mereka merasa bertanggung jawab terhadap alumninya untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan fungsi yang terakhir ini secara otomatis RUMPUN menjadi dipersepsikan publik sebagai menyediakan tenaga kerja PRT profesional. Dalam kenyataannya persepsi itu tidak terlalu salah mengingat RUMPUN pada akhirnya menjadi “penyalur” bagi para pengguna jasa (PJ) yang ingin mencari PRT. Dengan kualifikasi pengetahuan dan kemampuan tata boga yang memadai plus memiliki kemampuan tambahan dalam mengoperasikan komputer, mengemudi mobil, dan kemampuan bahasa Inggris secara terbatas, mau tidak mau mereka memiliki “tawar-menawar” yang lebih tinggi dibandingkan PRT yang tidak pernah kursus di sekolah alternatif ini.

Apa yang membedakan secara mencolok dengan PRT “konvensional” bahwa PRT alumni sekolah *alternatif* ini, setiap kerjanya selalu disertai dengan kontrak kerja secara tertulis. Tujuan utama dari kontrak kerja itu, di samping untuk melindungi pihak PRT dari perlakuan sewenang-wenangan dari pihak pengguna jasa, khususnya yang berkaitan dengan 4 jenis kekerasan (ekonomi, fisik, psikis, dan sosial), sebenarnya juga untuk melindungi pengguna jasa (PJ) atas kemungkinan tertipunya oleh PRT yang tidak bertanggung jawab. Isi dari kontrak kerja ini diluar menyangkut perjanjian gaji yang

disepakati, juga penentuan jenis kerja yang jelas, pemberian waktu istirahat, termasuk hak cuti berkala seperti lazimnya buruh di pabrik. Pada mulanya para pengguna jasa seringkali keberataan terhadap surat perjanjian itu, tetapi setelah diberikan penjelasan, bahwa salah satu tujuan surat kontrak itu juga untuk melindungi pengguna jasa dari kemungkinan pengingkaran PRT dalam melakukan tugas pekerjaan rumah tangga, termasuk lari dari rumah secara tidak bertanggung jawab, maka umumnya mereka menyetujuinya. Apalagi RUMPUN juga ikut bertanggung jawab atas kemungkinan terburuk dari seluruh pelanggaran kontrak oleh pihak PRT.

Salah satu yang masih belum berhasil diperjuangkan oleh RUMPUN adalah membuat standar gaji yang diberikan PRT sesuai dengan UMP (Upah Minimum Propinsi) yang berlaku. Misalnya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta Rp.365.000,-/per bulan, meskipun dalam tahap tertentu sudah melampauinya. Dalam kenyataannya kelaziman tawar menawar upah PRT di DIY baru Rp.250.000/per bulan untuk tata-boga, Rp.300.000/per bulan,- untuk baby sitter, dan Rp.400.000/per bulan untuk menjaga kaum manula. Dalam standar seperti ini bagaimanapun mereka masih jauh lebih baik dibandingkan dengan PRT tradisional yang standar gajinya sekitar Rp.75.000,-/per bulan s/d Rp.150.000/per bulan. Lebih dari sekedar gaji, dengan kontrak tertulis para pengguna jasa bukan hanya sekedar hati-hati tetapi juga lebih “memanusiawikan” PRT khususnya dalam memberikan hak-hak dasarnya, seperti pemberian gaji secara berkala, hak istirahat, dan bahkan memberikan hari libur setiap minggu sekali.

Salah satu hal yang sangat kentara atas “keberhasilan” dalam mencapai tujuan yang dicanangkan RUMPUN, khususnya dalam membuat posisi tawar-menawar mereka lebih kuat, sekali lagi, terbukti dari seluruh alumnya tak satupun yang tidak mendapatkan pekerjaan tanpa perlindungan yang tertulis (kontrak). Lebih dari itu para PRT bukan saja nampak percaya diri, tetapi juga, berani

membela diri. Mereka telah memiliki sarikat PRT, yang anggotanya sekitar 300-an di seluruh DIY, yang mungkin merupakan satu-satu di Indonesia.

Ketika *Focus Group Discussion* dilakukan pada jurusan tata-boga angkatan ketiga, nampak kepercayaan diri mereka dalam menghadapi masa depannya. Hampir seluruhnya menyatakan bahwa mereka bukan saja sangat senang dengan sekolah ini dan berterima kasih atas pendidikan yang telah diberikan pada forum ini, tetapi juga, menjadi mengetahui seluruh hak-hak yang dimiliki termasuk pengetahuan tambahan seperti kesehatan reproduksi dan sebagainya. Beberapa pernyataannya bisa direkam dibawah ini.

Suminem (bukan nama sebenarnya) wanita muda (15 tahun) berasal dari Magelang yang hanya tamat SD itu antara lain berkomentar:

“Saya senang di sini. Sekolahnya gratis dan tidak begitu formal banget. Banyak pengetahuan tambahan yang diperoleh. Disini diajari berjuang. Mengapa takut dengan PJ (Pengguna Jasa) selama kita benar. Ngapain PRT takut pada majikan. Kita harus berani ngomong kalau tidak diberi gaji”.<sup>6</sup>

Demikian juga Siti (bukan nama sebenarnya) dari Bantul dengan sangat lantang antara lain mengemukakan kesannya:

“Dengan bekal keterampilan yang diberikan disini, paling tidak gaji kita akan lebih besar jika dibandingkan kita dengan mereka yang tidak sekolah. Pokoknya nanti kalau bekerja saya tidak akan mau jika tidak ada kontrak kerja”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara tanggal 7 Juli 2004.

<sup>7</sup> Wawancara tanggal 7 Juli 2004.

Sementara Waljinah (bukan nama sebenarnya) wanita asal Klaten yang pernah bekerja di Jakarta antara lain menuturkan pengalamannya:

“Dulu saya takut sekali ketika dituduh mencuri. Padahal saya betul-betul tidak mencuri. Setelah disini kita diajari cara menghadapi masalah seperti itu. Saya merasa tidak sendirian lagi. Nanti kalau saya dituduh lagi akan saya laporkan ke polisi. Biar mereka tidak sembarang menuduh orang”.<sup>8</sup>

Dengan melihat seluruh proses pendidikan yang telah dilaksanakan serta hasil yang telah diraih, setidaknya dua tujuan utama pendidikan alternatif yang diberikan RUMPUN nampak tidak jauh dari sasaran yang ditetapkan. Para alumni lembaga ini bukan saja telah mendapatkan pekerjaan dengan tingkat “*bargaining position*” yang cukup memadai, tetapi juga, tingkat kesadaran kritis yang mampu membangkitkan kesadaran mereka untuk berorganisasi guna menolong dirinya sendiri.

### **Pengorganisasian Sebagai Lembaga Penyadaran**

Apa yang disebut dengan devisi Pengorganisasian, pada dasarnya lebih berfungsi sebagai Program penyadaran kritis atas pekerja rumah tangga atas hak-haknya yang selama ini terabaikan. Secara formal fungsi pengorganisasian untuk advokasi PRT itu antara lain meliputi:

- Memfasilitasi pendidikan dan pengorganisasian PRT (pendampingan, rumah singgah).
- Memfasilitasi terbentuknya serikat PRT.
- Memfasilitasi jaringan kerjasama antar kelompok PRT (forkom).

---

<sup>8</sup> Wawancara tanggal 7 Juli 2004

- Memfasilitasi media komunikasi dan informasi PRT: *news letter*.
- Mengadakan pengembang wilayah dampingan termasuk survey dan pemetaan wilayah.
- Membuat dan mengembangkan modul yang berkaitan dengan pendidikan dan pengorganisasian PRT.
- Melakukan kajian-kajian dan pengembangan metode pengorganisasian termasuk didalamnya melakukan evaluasi efektivitas pengorganisasian.
- Memfasilitasi kunjungan silang antar kelompok PRT; magang/pelatihan di serikat/organisasi pekerja.
- Memfasilitasi jaringan kerjasama dengan lembaga lain dalam pengembangan pengorganisasian pekerja Rumah Tangga.
- Mengkoordinasikan fasilitasi pengorganisasian termasuk pembagian tugas dan wilayah pengorganisasian yang menjadi tanggung jawab Devisi Pengorganisasian.<sup>9</sup>

Selama ini hasil pengorganisasian itu telah melahirkan 9 organisasi PRT yang berada dalam wilayah-wilayah kompleks perumahan kelas menengah keatas yang ada di wilayah Yogyakarta. Jumlah anggota serikat PRT yang ada di 9 lokasi itu diperkirakan sekitar 200-an tetapi yang aktif melakukan kontak bersama sekitar 100-an. Masing-masing forum itu melakukan diskusi mingguan membahas dan mendiskusikan segala permasalahan yang dihadapi. Forum diskusi yang mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi masing-masing PRT ini biasanya dilakukan pada malam hari atau hari libur. Meskipun forum semacam ini tidak selalu disetujui oleh pengguna jasa, tetapi berkat kepiawaian para PRT membungkus acara ini dalam bentuk pengajian, masak-masak, kursus menjahit, dan sebagainya acara forum diskusi itu jarang mendapatkan kendala.

---

<sup>9</sup> Profil., *Ibid.*, hal. 7.

Dengan dipandu dan didampingi oleh para pengurus RUMPUN, seluruh kajian berperspektif jender secara terus-menerus dikomunikasikan sebagai virus kesadaran kritis. Berkait kontinuitas forum diskusi berkala diantara anggota Serikat PRT ini, maka dari forum-forum ini sampai sempat melahirkan grup drama yang dimainkan oleh PRT. Selama ini grup ini telah pentas secara profesional selama 5 kali, satu kali diantaranya dipertunjukkan di TIM Jakarta dan satu kali yang lain di Kampus UGM, termasuk masuk di media televisi. Seluruh skenario dan penyutradaraan dirancang sendiri oleh para PRT yang mencoba mengkomunikasikan apa saja yang dialami dalam kehidupan sehari-hari termasuk berbagai diskriminasi yang dialami sehari-hari. Bahkan para PRT yang difasilitasi oleh RUMPUN telah memiliki bulletin bulanan secara berkala yang ditulis dan diasuh sendiri oleh PRT yang didampingi pengurus RUMPUN.

Majalah yang diberi nama Suara Serikat PRT yang merupakan media penguatan & pemberdayaan PRT, mungkin terlalu sulit untuk dipercaya jika para redaktur pelaksanaanya para PRT sendiri. Dalam edisi 2/tahun 1/2004 yang diberi judul Istirahat itu perlu: Perjuangan Buruh Migran Upaya Melonggarkan Nafas PRT, sungguh sangat mengesankan. Pemimpin redaksinya antara lain: Barayatul Husni, yang lebih sering disebut Yu Bar, seorang PRT yang bekerja di Jambusari yang konon punya hobi menulis sejak dia kecil. Sedangkan Redaktur pelaksanaanya adalah Yuli Maiheni yang juga merangkap sebagai ketua Serikat PRT se-Yogyakarta; Yu Jum (Jumiyem) yang kini sedang bekerja di Salon di daerah Gondomanan; sedangkan Yani Kairo yang pernah berkunjung ke Afrika termasuk pengasuh yang handal, sementara Ririn Sulastri penjaga warung borjo (bubur kacang lijo), seringkali sebagai penulis Tanjuk yang lugas.

Dibawah ini akan saya sajikan beberapa tulisan atau reportase yang dilakukan oleh para pengasuh majalah Suara Serikat PRT itu. Teras (tajuk rencana) yang ditulis Ririn dengan Judul: "Hadapi Kekerasan dengan Menghargai Perbedaan":

Kekerasan perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (pasal 1 dari deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan PBB, 1993).

- Persoalan kekerasan tidak luput kerap terjadi pada PRT, dan persoalan itu sangat perlu untuk dicermati. Karena bagaimana pun kekerasan dan pelecehan pihak yang termarginalkan dan pelakunya adalah pihak yang berkuasa terhadap modal atau pun kekuasaan.
- Segumpal harapan yang kamu bangun di tahun 2004 untuk meminimalisir segala bentuk kekerasan yang terjadi ditahun sebelumnya, harus kami telan secara pahit. Lebih tepatnya harapan itu tak seindah kenyataan. Karena diawal tahun ini pun sudah banyak terjadi kekerasan lagi. Bahkan lebih keras lagi, bahkan lebih parah lagi. Sembilan Januari 2004 adalah hari naas bagi Maryati, seorang PRT yang tewas dihajar majikannya. Disusul dengan pemerkosaan terhadap Nai, PRT yang bekerja di Solo dan pelakunya adalah pengguna jasanya sendiri. Demikian juga dengan Sumariyah, yang harus menderita kebutaan karena digosok matanya oleh pengguna jasa dengan balsem.
- Kekerasan itu tiada pernah berakhir. Karena ia ada seiring keberadaan manusia. Sama halnya dengan terjadinya kekerasan terhadap PRT pun tiada pernah akhir. Karena permasalahan PRT adalah permasalahan kelas. Dan permasalahan kelas itu akan selalu ada, selama perbedaan dicap dengan perbedaan. Yah, paling sederhana adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin, seorang buruh (pembantu) dan majikan, laki-laki dan perempuan.

- Ada hal mendasar yang perlu dicamkan dalam menghadapi permasalahan kekerasan dan perbedaan. Kita memang harus merefleksikan kepada diri kita sendiri untuk menerima perbedaan orang lain. Karena menghargai perbedaan merupakan awal untuk meminimalisir kekerasan. Sebelum berteriak, kekerasan, kekerasan, dan kekerasan diluar diri kita, selayaknya kita awali dengan menghargai perbedaan dari kita yang paling dalam.
- Dari lubuk hati yang paling dalam juga, Suara Serikat Edisi Februari ini dapat terbit. Dengan liputan tentang hak libur kerja bagi PRT, laporan perjalanan ke Afrika, dan juga profil reporter Suara Serikat PRT. Selamat menikmati persembahan ini dan salam penghargaan perbedaan. (Ririn)

Tanpa bermaksud untuk “meremehkan” tetapi siapa pun akan terlalu sulit untuk mempercayai jika tajuk itu ditulis oleh seorang ibu satu anak penjaga warung burjo. Bahasanya lugas pesan cukup terbaca seperti umumnya sebuah tajuk. Poros yang ingin diungkap adalah kekerasan yang tak henti-hentinya melanda perempuan, khususnya PRT. Penyiksaan fisik, pemerkosaan, dan perlakuan semena-mena lainnya, menurut tulisan ini lebih disebabkan oleh apa yang disebut dengan masyarakat yang berkelas. Bagaimana menggunakan analisisnya Karl Marx tentang kelas yang tidak pernah hilang selama ada hak milik, dan kesadaran itu digunakan sebagai alat represi bagi kelas dibawahnya. Sumbernya akibat kekuasaan dan modal yang secara kodrati terjadi, dapat tereliminasi jika tidak ada kesewenang-wenangan bagi yang sedang memilikinya. Konflik juga dianggap inheren dengan keberadaan masyarakat itu sendiri, seperti yang diyakini para teori konflik selama ini. Tidak diketahui secara pasti, apakah Ririn, si penulis Teras itu, juga rajin membaca buku-buku kiri yang selama ini sedang banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ataukah, tulisan ini semata-mata hasil renungan atau tafsiran atas realitas yang dilihatnya sehari-hari. Demikian juga “perbedaan” yang dianggap sebagai sumber persengketaan tidak

dilembagakan. Eliminasi kekerasan hanya akan terjadi jika perbedaan mampu dikelola secara proporsional. Dan kekerasan harus dihentikan dari diri sendiri.

Sementara itu reportase yang dilakukan Lek Jum dalam Relung, antara lain menuturkan kasus pemerkosaan PRT oleh pengguna jasa di Solo yang sampai sekarang masih belum terselesaikan. Kisah itu di tulis Lek Jum sebagai berikut:

“My, gadis berusia 18 tahun asal Purbayan, Singapur, Sukaharjo sangat malang. Perkosaan yang dilakukan Akhmad Yani, PJ yang merupakan salah satu *public figur* di Solo. Pemerkosaan itu sebanyak tiga kali. Peristiwa itu berawal pada 10 Januari 2004. Kemudian 15 Januari 2004, tersangka mengulangi lagi perbuatannya. Dan diulangi lagi pada 20 Januari 2004. Pada kesempatan kali ini tersangka melakukan di saat isteri dan ketiga anaknya pergi ke Salon pada pukul 18.00 WIB. Aksi yang dilakukan tersangka didahului dengan membekap korban se usai mandi. Korban dipegang erat tangannya, didorong, lalu diperkosa oleh tersangka di ruang tamu. Kejadian pemerkosaan ini berlangsung lebih dari lima menit.

Kemudian tersangka bersama keluarganya keluar rumah pada pukul 21.30 WIB. Dengan demikian korban ditinggal sendirian di rumah. Pada saat ditinggal sendirian tersebut, korban berinisiatif untuk menelpon saudaranya pada pukul 20.45 WIB. Dan korban minta dijemput pulang.

Pada tanggal 21 Januari 2004, untuk menutupi perbuatannya, korban diantarkan pulang kerumah saudaranya oleh tersangka. Dengan alasan perilaku korban beberapa hari terakhir ini sangat aneh.

Sesampai dirumah dan tersangka pulang, korban kemudian menceritakan peristiwa yang sebenarnya ia alami. Mendengar cerita korban, keluarga korban melaporkan kepada polisi didampingi oleh

pengacara, Eko Budiyono. Laporan korban kepada polisi tertanggal 21 Januari 2004 ternyata tidak mendapatkan respon baik. Hal ini menyangkut keberadaan tersangka sebagai pejabat *public figur*. Dengan rentetan jabatan yang diembannya, diantaranya: Kepala Seksi Perencanaan Anggaran di Pabeda Solo, mantan Lurah di kelurahan Laweyan, mantan Camat di kecamatan Jebres, anak mantan Bupati, dan anggota Associate IPGI (sebuah NGO kemitraan pemerintah, LSM, dan perguruan tinggi).

Kasus pemerkosaan ini sudah sampai pada pihak kepolisian. Dan polisi pun sudah melakukan proses hukum dengan memanggil tersangka selama tiga kali. *Akan tetapi tersangka tidak pernah hadir, walaupun hadir harus dengan pemaksaan (garis miring, pen)*. Sehingga kasus pemerkosaan ini pun tersendat-sendat dalam proses hukumnya. Hukuman pun tidak diberikan kepada pelaku perkosaan. Dan kasus perkosaan itu akan berhenti sejenak, lalu akan timbul perkosaan lagi. Karena itu si korban pihak lemah (Lek Jum).

Ada beberapa hal yang menarik dari kasus memperkosaan yang diceritakan Lek Jum diatas. *Pertama*, prinsip laporan jurnalistiknya sudah relatif memenuhi persyaratan yang paling baku yang mengikuti lima pertanyaan “magic” yang paling lazim digunakan dalam laporan jurnalistik: what, where, when, who, dan how. Dengan kata lain Lek Jum cukup menguasai teknis jurnalistik yang paling dasar itu. *Kedua*, dari segi substansi, bukan hanya ada nuansa pembelaan (baca: kesetia kawan yang kuat) yang digambarkan adanya tradisi keterbatasan hukum, ketika hal itu berhadapan dengan orang kuat (pejabat), tetapi juga, ingin menyampaikan diktum ketidakadilan hukum di negeri ini ketika berhadapan dengan orang kuat (pejabat) versus orang lemah (PRT). Maka pelecehan hukum sebenarnya tidak hanya menyangkut pada kasus objek hukum antara seorang PJ dan PRT, tetapi juga, mengingatkan polisi bahwa sebagai penegak hukum sebenarnya lembaga ini juga “dilecehkan”. Terutama atas ketidak hadirannya terdakwa ketika dipanggil sampai ketiga kali.

*Ketiga*, secara implisit Lek Jum juga “mencurigai” bahwa harga sebuah keadilan pada akhirnya sangat ditentukan oleh relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara yang lemah dengan yang kuat: dimana harga ketidakadilan itu, kemungkinan telah jual-belikan. *Keempat*, *saking* bersemangatnya membela kawan sekerja, dan mungkin kemarahan, Lek Jum terjebak pada ketidakseimbangan dalam melindungi “tersangka” dalam prinsip praduga tak bersalah. Sang korban, demi masa depannya dilindungi identitasnya dengan inisial “MY”, sedangkan terdakwa secara vulgar telah disebut identitasnya sebagai “Akhmad Yani”. Demikian juga Lek Jum menjadi sedikit kurang kritis dalam menarasikan peristiwanya sendiri. Jika durasi waktu pemerkosaan telah dicatat secara ketat (memakan waktu lima menit), maka tidak demikian halnya atas kronologis waktu yang dicatat, ketika sang korban mencoba menelpon keluarganya untuk dijemput. Disini Lek Jum agak kedodoran. Seperti tertulis dalam reportasinya diatas, Lek Jum menceritakan, setelah terjadi pemerkosaan, “terangka bersama keluarganya keluar rumah pada pukul 21.30 WIB... Pada saat ditinggalkan sendirian tersebut, korban berinisiatif untuk menelpon saudaranya pada pukul 20.45 WIB. Dan korban minta dijemput pulang”. Di sini ada pencatatan cerita yang tidak masuk akal. Yaitu, jika majikan keluar rumah pada pukul 21.30 WIB, dan “MY” ingin memanfaatkan kesendiriannya untuk menghubungi keluarga, maka telponnya bukan pukul 20.45 WIB. Sebab pada saat itu tersangka dan keluarganya masih ada di rumah. Yang masuk akal “MY” baru telpon setelah pukul 21.30 WIB. Mungkin maksudnya pukul 21.45 WIB. Atau, tersangka meninggalkan rumah bukan pukul 21.30 WIB, tetapi pukul 20.30 WIB.

Demikian juga dalam menggambarkan “kekebalan” tersangka didepan hukum dengan mengabaikan panggilan polisi selama tiga kali. Menurut laporan Lek Jum, “tersangka tidak pernah hadir, walaupun hadir harus dengan paksaan”. Disini tidak jelas: apakah selama dipanggil polisi tersangka tidak pernah hadir, atau pernah hadir ketika dipaksa polisi.

Apapun kekurangan reportase yang dilakukan Lek Jum, tetapi pesan yang ingin disampaikan cukup jelas dan berhasil dinarasikan dengan baik. Salah satu kata kunci reportase itu diluar ingin menggambarkan buramnya rasa-keadilan, khususnya ketika menimpa orang yang tidak berdaya, juga mengingatkan kita semua, bahwa kasus MY, hanya sebuah contoh dari menguapnya rasa keadilan ketika sang lemah berhadapan dengan sang kuat. Prinsip “justice for all” hanya ada diatas kertas. Dan, yang tak kalah penting, Lek Jum, telah menunjukkan rasa solidaritas melalui empati yang dalam. Dalam kontek ini, RUMPUN nampak berhasil membangun kesadaran bersama itu.

Dalam kasus lain, pada tanggal 7 Juli 2004, menjelang disidangkannya kasus “penganiayaan” atas PRT yang tidak dibayar majikannya selama 6 tahun dan penyiksaan fisik secara tidak manusiawi oleh pengusaha restoran (bakmi), para siswa sekolah alternatif sedang mempersiapkan sebuah pohon cemara kecil, yang dihiasi dengan bintang-bintang dari kertas. Ketika saya tanyakan untuk apa pohon itu, salah seorang pembuatnya menjawab dengan bersemangat: “Untuk mengungkapkan rasa solidaritas pada pengadilan besok”. Maksudnya pada pengadilan kasus PRT itu yang akan dilakukan pada tanggal 10 Juli 2004 di pengadilan Yogyakarta. Jika mungkin, katanya, pohon itu akan diberikan pada pak Hakim, sebagai simbol pohon keadilan atau dibawa sebagai pohon harapan keadilan yang diatasnya ada bintang”, kata salah seorang pembuat pohon.

Tulisan lain yang menarik juga untuk disimak adalah tulisan Yuli Maeheni, ketua serikat PRT DIY. Dalam kolom relung pada Suara Serikat PRT, edisi 3/tahun 1/2004, dengan judul “Putusan Pengadilan yang Mengecewakan” menceritakan kasus yang kemudian mampu membangkitkan para calon PRT di sekolah alternatif itu, secara setia mengikuti proses keadilan yang sedang berjalan. Secara lengkap tulisan itu sebagai berikut;

"15 Maret 2004 merupakan hari bersejarah bagi Sutini, seorang PRT yang mendambakan keadilan. Pahalanya dihari tersebut Majelis Hakim mengetuk palunya untuk membuat sebuah keputusan terhadap penganiayaan yang dilakukan pengguna jasa (PJ) Sutini. Yakni: Erna, Ester, dan Kong. Akan tetapi keadilan yang didambakan itu tiada pernah kunjung tiba. Karena keputusan yang diberikan adalah hukuman percobaan selama 4 bulan. Untuk sebuah ketidakadilan kerja yang dialami Sutini, putusan itu sangatlah tidak adil, karena pihak yang nyata-nyata bersalah tidak pernah mendapatkan hukuman terhadap perbuatannya tersebut.

Penganiayaan tersebut terjadi selama Sutini bekerja di rumah makan Mie di Bandung. Selama bekerja, Sutini mendapatkan penganiayaan secara fisik, berupa penyiksaan dari pengguna jasa, meliputi: penjeweran telinga dan pemukulan. Demikian juga penganiayaan secara psikis dengan caci-maki dan penghinaan. Dan satu hal lagi penganiayaan secara ekonomi upah yang tidak terbayarkan sesuai dengan beban kerja yang berat. Bekerja mulai dari jam lima pagi sampai dengan jam 9 malam. Dan Sutini hanya mendapat sebanyak 40 ribu rupiah sampai dengan 150 ribu rupiah, itupun ketika dia sudah bekerja sangat lama. Yakni sekitar 6 tahun bekerja. Keadilan memang tidak pernah berpihak pada yang lemah, tetapi justru kepada pihak yang memegang kekuasaan dan modal. Siapa yang memiliki jabatan dialah yang akan mengendalikan hukum. Demikian juga memiliki kekayaan tentu akan mendapatkan peluang hukum bagi semuanya.

Di tengah kesepakatan hukum di negara ini, ada sebuah lilin yang akan tetap menerangi kesepakatan malam. Kesepakatan terhadap kasus Sutini, perlu mendapatkan perhatian dari kita yang mencoba mengurai benang kusut. Walaupun menurut pengakuan Sutini, Pengguna Jasanya tergolong orang yang kurang mampu secara materi, kerugian yang diderita Sutini harus dibayar. Karena bagaimana pun kondisi Sutini, sangat memerlukan materi untuk

mebiayai anaknya sekolah dan menghidupi keluarganya yang sangat memperhatikan kondisinya di Pacitan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, tim kuasa Sutini melakukan gugatan ulang terhadap kasus tersebut, terutama gugatan perdata berkaitan dengan upah yang tidak terbayarkan. Walaupun upah itu belum tentu kembali, akan tetapi ada secercah harapan bagi praktisi hukum, bahwa hukum itu tidak begitu saja dapat dihitam putihkan dengan materi. Dan bagi Pengguna Jasa menjadi tersentuh terhadap pekerjaannya untuk memperlakukannya layaknya pekerja dan ada proses hukum setiap ada pelanggaran. Buat aparat Pemerintah tergerak untuk segera mengeluarkan sebuah kebijakan, terutama UU Ketenaga kerjaan yang memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Rumah Tangga (PRT). Karena tanpa adanya penguatan dari pemerintah kasus penganiayaan terhadap PRT akan terus terjadi dengan model yang berbeda. Dan bagi PRT sendiri menjadi pelajaran yang berharga, untuk siap dan waspada terhadap pekerjaannya. Dengan satu penekanan bahwa kita sama dihadapan semuanya (Yuli Maeheni).

Apa yang ditulis oleh ketua Serikat Pekerja Rumah Tangga itu, nampak sekali warna ideologinya, pembebasan dan solidaritas. Usaha untuk membangkitkan rasa solidaritas dikalangan teman-teman sesama anggota serikat terbukti cukup mujarab. Para anggota serikat, paling tidak yang masih belajar di sekolah alternatif telah ikut hadir dalam persidangan dan memberi dukungan moral pada kasus Sutini. Meskipun agaknya Yuli juga cukup menyadari bahwa dalam kasus tuntutan perdata itu, khususnya tuntutan agar PJ membayar gaji Sutini selama 6 tahun cukup pesimis, mengingat PJ Sutini secara ekonomi juga tidak terlalu kuat, tetapi apa yang ingin diperlihatkan dalam tuntutan perdata yang dilakukan RUMPUN itu adalah perlunya pendidikan hukum. Khususnya bagi para hakim yang memutuskan perkara dan para publik, agar tidak sewenang-wenang memperlakukan kaum lemah (baca: PRT).

Akhirnya satu tulisan yang ditulis oleh Yani Kairo dalam Teras (Tajuk Rencana) pada Suara Serikat PRT, edisi 3/tahun 1/2004, dengan judul: "Menanti Keterwakilan PRT di Parlemen, Mungkinkah?" menarik untuk disimak:

"Tahun Pemilu menjadi julukan untuk tahun 2004, sebagai sarana demokratisasi untuk menentukan siapa yang akan duduk mewakili rakyat di legislatif maupun eksekutif. Pemilu tahun 2004 ini tampil beda dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya. Rakyat mempunyai hak untuk memilih wakil-wakilnya secara langsung. Dimana pemilih calon legislatif diselenggarakan tanggal 5 April. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, tanggal 5 Juni 2004.

Keterwakilan rakyat kecil, salah satunya Pekerja Rumah Tangga (PRT) di dewan menjadi agenda penting dalam setiap pemilu. Akan tetapi di sepanjang penyelenggaraan pemilu banyak kepentingan rakyat kecil yang tidak terwakilkan. Sebaliknya yang menjadi titik tekan adalah kepentingan golongan, yang larinya pada kekuatan neo-liberalisme yang dalam jangka waktu lama justru membuat rakyat kecil justru harus menanggung kerugian.

Pentingnya keterwakilan perempuan, karena 90 persen PRT adalah perempuan, yang berkaitan dengan kebijakan untuk mengatur kepentingan perempuan. Nilai plus Pemilu 2004 adalah adanya kuota 30 persen untuk caleg perempuan bagi setiap partai politik. Penggolan kebijakan tersebut merupakan tindakan afirmatif untuk membuka kiprah perempuan dalam politik.

Akan tetapi kita, kaum perempuan perlu berefleksi. Hasil pemilihan langsung legislatif, dari caleg perempuan sedikit yang mendapatkan tempat di masyarakat. Sehingga memperkecil jumlah suara yang masuk ke dewan. Dan ketua terpilih belum tentu memahami permasalahan perempuan, khususnya PRT. Hal tersebut membuat kita perlu membenahi strategi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan perempuan.

Edisi khusus Pemilu 2004, Suara Serikat PRT mencoba mengupas keterwakilan perempuan di legislatif. Mampukah anggota legislatif mampu menyuarakan kepentingan perempuan. Terutama berkaitan dengan perlindungan hukum kepada PRT. Pasalnya banyak kasus yang menimpa PRT, mulai gaji yang tak terbayarkan, sampai pada kasus terakhir muncul, yakni penyiksaan terhadap buruh migran di Malaysia. Banyaknya kasus tersebut disebabkan adalah tidak adanya perlindungan hukum terhadap PRT. Tulisan tentang pemilu ini, semoga sedikit membuka hati para legislatif untuk merekonstruksi ulang apa yang menjadi agenda perlindungan kepada rakyatnya.

Redaksi juga menampilkan perjalanan kasus penganiayaan terhadap PRT, yakni Sutini. Perjalanan hukum yang tidak pernah berpihak pada PRT, sangat relevan dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap PRT. Demikian juga dengan sajian *Voter Education* (Pendidikan Pemilih) sebagai sarana membuka mata pemilih terhadap wakilnya di legislatif. Semoga pilihan anda dapat mewakili masyarakat yang membutuhkan (Yani Kairo).

Apa yang ingin disampaikan dalam Teras diatas paling tidak memuat tiga hal. *Pertama*, sudah menjadi konsekuensi logis jika jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki, mendapatkan perwakilan yang memadai dalam parlemen. Karenanya, kuota 30 persen yang ditetapkan oleh partai politik sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah *given*. Sebagai kelompok yang tertindas, idealnya PRT memiliki wakilnya di parlemen, tapi mungkinkah?. *Kedua*, tulisan itu juga mengingatkan bahwa keterwakilan rakyat kecil yang nyaris tidak pernah terjadi didalam sejarah perwakilan di Indonesia, yang diperburuk oleh pilihan neo-libelarisisme yang dianggap tidak memihak pada si lemah. *Ketiga*, meskipun sistem kuota dianggap sebagai peluang politik bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya, tapi keterwakilan perempuan, khususnya kelompok terlemah seperti PRT, sangat diragukan. Maka satu-satu perlindungan yang sistematis perlu diperjuangkan adalah lewat perlindungan hukum.

Nampaknya yang secara implisit ingin disampaikan, sebagai kelompok yang termarjinal, UU yang secara khusus melindungi PRT belum ada. Dengan demikian perjuangan kesetaraan PRT yang dianggap sebagai pekerja (buruh) perusahaan, sampai hari ini masih dalam daftar keinginan mereka. Tiadanya perlindungan hukum terhadap PRT, telah banyak memakan korban termasuk TKW di Malaysia.

Kemampuan penulisnya dalam menggabungkan antara peluang yang dimiliki perempuan dalam sistem kuota, keraguannya atas sistem keterwakilan itu yang mampu memperjuangkan kelompok PRT dan kebutuhan regulasi dibidang hukum yang secara eksplisit melakukan perlindungan terhadap PRT, sungguh ramuan opini yang mencerminkan kemampuannya dalam menyadap rintihan dunia PRT, yang tak henti-hentinya dimarjinalkan oleh realitas, termasuk realitas politik.

Satu lagi artikel yang ditulis oleh Puji Astuti, anggota PRT DIY, yang berjudul : “Perempuan dalam Pemilu”, menarik disajikan di sini:

“Pemilu sudah tiba. Hampir semua komponen masyarakat berharap pemilu berjalan lancar. Partai politik menata diri untuk mencapai suara sebanyak mungkin. Berbagai teknik *marketing* digunakan untuk menarik simpati masyarakat. Mulai dari merancang dan mematangkan *platform* sampai mencari model iklan artis dan *public figur* ternama. Akhirnya yang terjadi di dalam setiap kampanye bukannya sosialisasi para calon legislative tapi konser dangdut. Jadi wajar jika masyarakat banyak yang mengeluh “gimana mau milih, wong para legislatifnya aja nggak kenal”?.

Perhelatan besar di tahun ini akan memunculkan dua peluang pada satu sisi, pemilu dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan Indonesia baru yang demokratis dan mampu membawa bangsa dari krisis ekonomi. Disisi lain pemilu akan gagal jika hanya akan menghasilkan orang-orang lama berwajah lama atas nama demokrasi. Namun semuanya itu menjadi hal yang sangat

membingungkan masyarakat. Karena realitas yang terjadi selama ini setiap pemilu hanya dijadikan ajang bagi para calon wakil rakyat untuk memperbaharui janji yang dulu pernah ditawarkan.

Perempuan pun berperan besar dalam pemilu. Disebabkan goalnya UU tentang posisi caleg perempuan di dewan sebesar tiga puluh persen dari keseluruhan. Hal ini mendapatkan respon dari masyarakat perempuan pemilih, yang melahirkan slogan “suara perempuan untuk perempuan”.

Akan tetapi mekanisme internal partai politik belum jelas. Hal itu menimbulkan pesimisme perempuan untuk menjadi anggota legislatif, sebab ada beberapa tantangan yang harus dihadapi perempuan. Salah satunya adalah faktor sosio-kultural yang sangat diwarnai oleh kuatnya budaya maskulin atau patriarki didalam masyarakat. Bisa dipastikan bahwa perempuan akan sulit bertarung dengan calon-calon lelaki yang selama ini memang sudah mendominasi arena politik dan secara kultural dianggap sebagai pemimpin perempuan.

Partai politik yang banyak bicara mengenai perempuan hanya bertujuan untuk mencari suara terbanyak. Karena kuantitas perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, maka pemilu akan menjadi tidak objektif. Dan ini berarti perempuan hanya dimanfaatkan saja. Lalu bagaimana dengan penerapan kuota tiga puluh persen untuk perempuan di legislatif, mungkin hanya untuk menggagang suara dan isu belaka.

Kesetaraan gender selalu menghiasi media dan menjadi topic dalam diskusi, seolah-olah dijadikan *money politics*. Hak-hak perempuan selalu dikatakan sama dengan laki-laki namun realitasnya sangat sedikit yang kita temukan, itupun sangat sulit untuk mendapatkannya. Seandainya kita mendapatkan peluang kerja, tetapi upah yang diberikan berbeda dengan laki-laki untuk jenis dan beban kerja yang sama. Dengan adanya sistem Pemilu yang membuka kesempatan untuk kaum perempuan untuk duduk dikursi legislatif,

diharapkan bisa membawa perubahan yang nyata. Mampu membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mewujudkan kesetaraan gender. Dengan adanya kebijakan tersebut, bangsa kita tidak hanya memiliki kuantitas perempuan, tetapi juga berkualitas. Dan dapat mengikis anggapan bahwa perempuan hanyalah “konco wingking”.

Demi keberhasilan harapan-harapan tersebut maka perempuan pun harus belajar politik dari sekarang. Tidak hanya mengikuti apa kata suami. Harus berani menentang segala sikap yang merugikan seperti otoriter, pengeksploitasian, posesif. Cita-cita ibu kita Kartini yang dinyatakan dalam buku “habis gelap terbitlah terang” pun menjadi nyata.

Artikel yang ditulis PRT Puji Astuti ini, nampak lebih mendasar. Diluar ia mencurigai gejala lama yang tampil dalam kemasan baru, baik para aktor yang tampil dalam wakil rakyat, maupun janji lama yang dikemas dalam format baru. Ia juga meragukan adanya itikat baik dari sistem kuota yang dijanjikan pada kelompok perempuan. Kesetaraan gender yang didengung-dengungkan dalam kemasan kampanye, lebih dipandang sebagai “bujukan” bagaikan “money politics” yang tidak permanen dan menguap dalam kebutuhan jangka pendek. Karenanya, demikian nasehatnya, sistem kuota harus dimanfaatkan secara maksimal. Biar antara kuantitas dan kualitas berjalan seiring, maka para perempuan harus mulai belajar politik. Dan akhirnya yang tak kalah menarik dalam tulisan ini, bahwa semuanya itu yakni “termarjinalnya” kelompok perempuan itu lebih dikonstruksi oleh sosial-budaya yang maskulin dan/atau patriakhi.

Akhirnya dalam analisis isi terhadap apa yang telah dituangkan para PRT dalam berbagai tulisan diatas telah menunjukkan bahwa jika mereka diberi kesempatan dan ruang untuk berekspresi, beropini, melakukan advokasi dan sebagainya, ternyata mereka melebihi apa yang diperkirakan banyak orang.

### **Cita-cita yang Tercecer**

Untuk melengkapi kebutuhan perlindungan atas PRT selama menjalankan pekerjaannya, RUMPUN juga membuka divisi advokasi dan konseling. Baik yang berkaitan dengan problem para PRT selama menjalankan pekerjaannya, maupun yang membutuhkan pendampingan proses hukum, seperti dalam kasus pemerkosaan atau penganiayaan yang termasuk dalam tindakan pidana. Selama 2003 misalnya lebih dari 50 kasus yang telah masuk dalam lembaga, yang kemudian dikategorikan dalam kekerasan: ekonomi, fisik, psikis, dan sosial. Menurut empat kategori kekerasan yang telah dibuat, kasus yang paling banyak masuk dalam divisi ini adalah kasus kekerasan ekonomi (eksploitasi). Dari kasus yang diajukan sebagian besar berupa pengingkaran janji atas pembayaran upah yang seringkali tidak sesuai dengan yang disepakati. Sedangkan kasus kedua lebih banyak berkaitan dengan tindakan kekerasan yang bersifat fisik. Mulai dari penganiayaan yang melampaui batas sampai pada memperkerjakan melampaui batas waktu yang paling lazim, tanpa memberikan waktu istirahat. Semuanya itu hanya semakin menegaskan bahwa masalah kontrak kerja, merupakan kebutuhan yang paling minimal untuk dipenuhi. Dalam kenyataannya penanda tangan kontrak oleh kedua belah pihak, telah memberikan dampak positif terhadap rendahnya pelanggaran (kekerasan) atas PRT yang tidak memiliki kontrak kerja.

Salah satu agenda yang sampai hari ini belum berhasil diperjuangkan sebagai perlindungan PRT yang lebih permanen adalah adanya UU atau paling tidak Perda yang secara eksplisit, memberi perlindungan pada PRT. Selama ini upaya perubahan kata “pembantu” menjadi “pekerja” tidak dengan sendirinya membawa implikasi pada kesamaan perlindungan dalam bentuk UU seperti yang terjadi terhadap buruh pabrik, misalnya. Terlalu sulit untuk memperjuangkan masalah PRT agar dibuat Undang-Undang secara tersendiri. Undang-undang yang ada dalam tenaga kerja formal

seperti buruh pabrik, dianggap terlalu umum, sehingga tidak memadai untuk melakukan upaya perlindungan terhadap PRT. Meskipun selama ini pembuatan *draft* sudah pernah dilakukan dan diajukan di DPRD, namun pembahasannya selalu tertunda-tunda dengan alasan yang tidak jelas sampai akhirnya masa kerja dewan berakhir. Dalam kenyataannya Perda yang berkaitan dengan masalah yang mendatangkan PAD seperti masalah parkir lebih didahulukan dibandingkan dengan masalah PRT.

Paling banter usaha perlindungan dalam bentuk formal adalah terbitnya Surat Edaran dari Gubernur DIY agar para Bupati memperhatikan masalah perlindungan terhadap PRT di wilayahnya. Dengan terbatasnya perlindungan hukum yang lebih khusus, maka jalur hukum yang ditempuh selama ini hanya memanfaatkan perlindungan PRT dari KUHP yang menyangkut tindak pidana atau perdata. Berbagai tindakan itu telah ditempuh dalam pembelaan kasus PRT Sutini dan kasus penganiayaan di Surabaja dan Solo. Selama ini untuk berbagai kasus yang menyangkut PRT, RUMPUN selalu mengadakan koordinasi dengan LSM setempat, sekiranya kasus itu ada di luar DIY.

## Penutup

Jika dilihat dari seluruh gerakan yang telah dilakukan RUMPUN maka sangat terlihat adanya konsisten dalam melakukan perlindungan terhadap PRT. Bahkan sejak awal pilihan untuk memberdayakan kelompok termarginal ini, lebih didasari oleh kenyataan bahwa profesi ini dianggap paling rentan terhadap kekerasan dan sekaligus paling rapuh dalam perlindungannya. Hampir tidak terlalu banyak lembaga yang menaruh perhatian terhadap kelompok termarginal ini, khususnya terhadap PRT domestik. Padahal sebagai sebuah profesi pekerjaan, ia bukan saja mulia tetapi juga perlu mendapatkan penghargaan seperti lazimnya sebuah pekerjaan lain. Terbungkusnya profesi PRT di tengah-tengah masih

kuatnya budaya patriarki dan feodalisme yang masih kental, usaha penggugatan martabat profesi ini dalam bentuk kontrak, ternyata bagaikan melakukan perubahan paradigmatis atas orientasi pembangunan.

Dari berbagai upaya-upaya yang dilakukan RUMPUN mulai dari pendidikan alternatif sampai pada penguatan kesadaran kritis melalui pemberdayaan kelembagaan serta upaya advokasi, maka terlihat bahwa paradigma yang digunakan dalam memberdayakan PRT memiliki kemiripan dengan pandangan *Gender and Development* (GAD). Setidaknya prinsip GAD yang menganggap perempuan tidak boleh diletakkan sebagai obyek pembangunan, melainkan harus menjadi aktor (subyek) pembangunan itu sendiri. Setidaknya, begitulah pengakuan salah satu pengurusnya bahwa:

“PRT dianggap bagian dari kelompok perempuan yang tertindas dan selalu diposisikan sebagai obyek. Kita menginginkan mereka punya peran. Mereka tidak hanya diwarnai tetapi juga mewarnai sebagai subyek. Kita punya perspektif bahwa mereka adalah sebagai kelompok yang marginal dan dimarginalkan. Mereka memiliki “bargaining position” yang rendah. Ini harus menjadi prioritas dan diangkat lebih dulu”.<sup>10</sup>

Dalam pandangan PRT sendiri, seperti yang terbaca dalam Suara Serikat PRT, bahwa suasana termarginalnya PRT lebih disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya konstruksi realitas yang didominasi oleh budaya patriarki. Kedua, adanya kesadaran kelas yang secara sosial yang telah menstigmakan PRT sebagai masyarakat tanpa kelas. Ketiga, adanya pusat kekuasaan dan modal yang mampu sebagai sumber eksploitasi. Keempat, ikut sertanya neo-liberalisme sebagai kepanjangan pembangunan model kapitalisme bukan saja dianggap paling bertanggung jawab atas

---

<sup>10</sup> Wawancara 7 Juli 2004.

proses marginalisasi, tetapi juga, dianggap tidak memiliki kepedulian terhadap kelompok yang tersingkir oleh derap persaingan bebas itu.

Jika dilihat dari seluruh prinsip-prinsip yang diyakini RUMPUN dengan para PRT yang telah diberdayakan itu, maka nampak bahwa paradigma itu banyak memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip yang dimiliki GAD, yang juga memandang bermasalah corak pembangunan kapitalis dengan segala neo-neonya yang banyak memarginalkan perempuan dunia ketiga sebagai objek pembangunan.

### Bab III – Profil 2 ORNOP Perempuan Di Indonesia

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

**D**ari hasil temuan kedua ORNOP Perempuan, Rifka Annisa dan Roempoen Tjoet Njak Dien tersebut, ada beberapa poin penting yang perlu digaris bawahi disini:

- (1) Kedua ORNOP perempuan yang memilih ranah domestik untuk memulai pemberdayaannya terhadap perempuan tersebut merupakan pilihan unik sekaligus kekuatan keduanya. Pertama, penanganan masalah perempuan di ranah domestik menuntut pendekatan yang ekstra hati-hati, dikarenakan harus mempertimbangkan perspektif korban. Dalam konteks Rifka Annisa, kekerasan dalam ranah domestik menurut pandangan umum masyarakat, secara kultural belum diterima sebagai permasalahan sosial yang penting yang memerlukan pemecahan bersama secara terbuka. Demikian pula dengan arah kebijakan pemerintah yang masih bersifat patriarkhis. Roempoen Tjoet Njak Dien dengan PRT sebagai subyek pemberdayaannya, merupakan ranah permasalahan yang fundamental dengan memperbaiki kondisi hubungan kerja majikan dengan pembantu rumah tangga. Kondisi keduanya merupakan sosialisasi nilai-nilai yang begitu lama tertanam pada masyarakat bagaimana perempuan direpresentasikan dan diposisikan dalam masyarakat. Sehingga persoalan-persoalan domestik berujung kekerasan semacam ini memang jauh tersembunyi dari tangkapan dan sorotan publik.
- (2) Dalam konteks gerakan, keduanya memiliki strategi yang berbeda. Dalam kasus Rifka Annisa ada kesulitan untuk mengubah, mentransformasi dari fase pelayanan menuju pengorganisasian. Karena dengan dua peran yang sekaligus ingin diembannya ini, yaitu peran melayani dan mengorganisir, jika

tidak hati-hati akan menyebabkan kontradiksi. Karena disatu sisi pelayanan kerap menyebabkan ketergantungan korban kepada Rifka Annisa, dan disisi lain pengorganisasian berupaya mendorong sikap kritis, solidaritas, dan kemandirian korban. Demikian pula dalam kasus Roempoen. Dilema ini merupakan salah satu persoalan besar dari gerakan perempuan selama ini. Posisi melayani dan mengorganisir menuju gerakan perempuan yang strategis membuat gerakan perempuan terkesan tidak mempunyai arah yang jelas dalam perjuangannya.

- (3) Luasnya minat dan persoalan yang ditangani, menjadikan gerakan perempuan ini kesulitan untuk mengidentifikasi sebagai persoalan bersama selama ini. Dari beberapa wawancara dikemukakan bahwa persoalan utama bukanlah mempermasalahkan siapa membuat apa, namun ketepatan mengidentifikasi dan merespons kebutuhan perempuan sebagai subyek pemberdayaan dianggap lebih penting.
- (4) Perubahan fokus perjuangan di lapangan selama ini didasarkan pada tiga hal, isu global tentang pemberdayaan perempuan yang mempunyai implikasi pada program kerja lembaga Donor yang kadang-kadang berbeda dengan kebijakan organisasi, Konstelasi sosial politik nasional, yang mempunyai implikasi dengan lebih peka menerjemahkan kebutuhan perempuan subyek pemberdayaan dan ketiga persoalan internal yang meliputi kebijakan organisasi, visi, misi dalam mensiasati situasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Fakih, Mansour, Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Cetakan kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

\_\_\_\_\_, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Cetakan kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte, Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial, Jakarta: Grafiti, 1997.

Natsir, Lies Marcoes, Perempuan dan LSM Perempuan; Sebuah Tinjauan Selayang Pandang, dalam Menjurus Arus, Seperempat Abad Femina: mendorong Kemajuan Wanita Indonesia 1972-1977, Jakarta: PT Gaya Favorit Press, 1997.

Wieringa, Saskia, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Jakarta: Garba Budaya, 1999.

\_\_\_\_\_, Kuntulanak Wangi Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950, Jakarta: Kalyanamitra, 1998

Tong, Rosemarie Putnam, Feminist Thought – A More Comprehensive Introduction, Second Edition, Colorado: Westview Press, 1993.

Shiva, Candana, Staying Alive, London: Zed Book, 1989.

Boserup, E., Women's Role in Economic Development, London: George Allen and Unwin, 1970.

Daftar Pustaka

- Maguire, Pat., *Women in Development: An Alternative Analysis*, Amherst MA: Center For International Education, 1984.
- Muchtar, Yanti., *Gerakan Perempuan Indonesia dan Politik Gender Orde Baru, dalam Gerakan Perempuan Sedunia*, Jakarta: Jurnal Perempuan.
- Hafidz, Wardah, *Gerakan Perempuan, Dulu, Sekarang, dan Sumbangannya kepada Transformasi Bangsa, dalam Faudjie Ridjal (ed.), Dinamika gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Harding, Sandra, *Introduction: Is There a Feminist Method?.*, dalam S. Harding (ed), *Feminism and Methodology.*, Bloomington: Indiana University Press, 1987.
- Rifka Annisa; *Tiada Kekerasan Terhadap Perempuan Bila Ada Gerakan Sosial, Laporan Refleksi 10 Tahun Perjalanan Rifka Annisa*, 2003